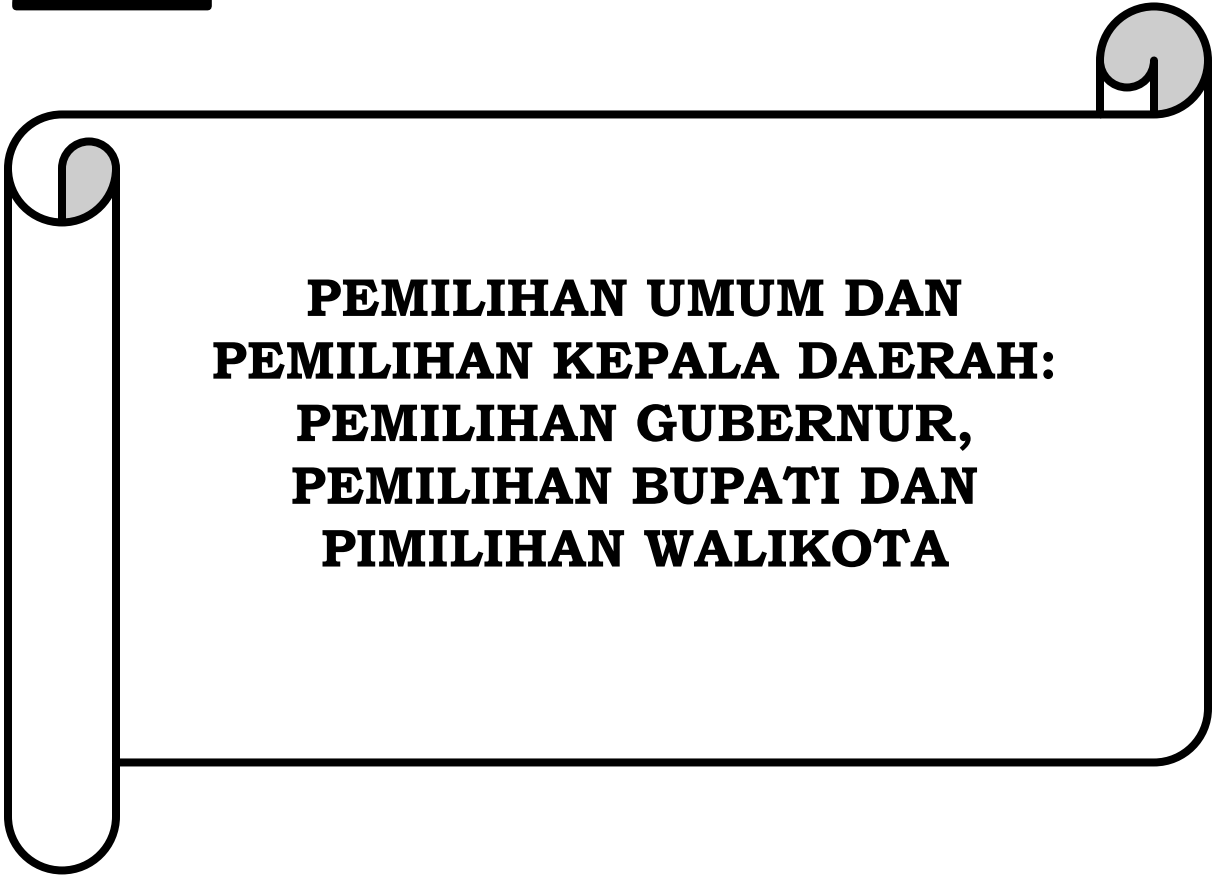


2



**PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH:
PEMILIHAN GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN
PIMILIHAN WALIKOTA**

BAB X

*PILKADA KALBAR LANGSUNG: ALTERNATIF DAN PERSPEKTIF DI DALAMNYA*¹

Kepala Daerah (PILKADA) Kalbar tahun 2007 merupakan PILKADA pertama secara langsung dan akan tercatat dalam sejarah Kalbar. Ajang persaingan politik ini sudah dipastikan akan menjadi peristiwa demokrasi yang sangat demokratis, seru, bergengsi dan berbobot, dibanding seandainya pesta demokratis 2007 ini dilaksanakan tidak secara langsung atau apapun namanya – setengah langsung misalnya – yang dipilih baik oleh wakil-wakil rakyat di DPRD untuk pemilihan kepala eksekutif maupun oleh Senat Universitas untuk pemilihan Rektor (PILREK). Tetapi, kondisi ini, menurut saya, tidak akan terjadi di kalangan para anggota Senat UNTAN, karena mereka memiliki intelektualitas dan integritas tinggi..

Keuntungan Materi atau Masa Depan Bermartabat?

Mengapa pemilihan secara langsung akan jauh lebih indah, demokratis dan bergengsi? Jawaban dari pertanyaan di atas adalah bahwa rakyat – pada PILKADA – dan para dosen – misalnya pada PILREK di Universitas – yang memilih secara langsung para pemimpin mereka tidak mempunyai kepentingan apapun dalam bentuk materi (*material interests*) dan janji jabatan politik atau ekonomi (*economic, or political promises for positions*) yang bersifat keduniaan (*other worldly interests*), kecuali, kesejahteraan dan kehidupan hari depan bersama yang lebih berkualitas, berlanjut dan bermartabat. Dengan demikian, pemilihan langsung dari bawah akan menjadi salah satu alternatif penting dalam usaha mengurangi keterpurukan – walaupun mau dikatakan sebagai kebangkrutan – bangsa ini, khususnya dalam mengatasi krisis kepemimpinan nasional dan daerah.

¹ Tulisan ini dimuat dalam *Harian Equator*, terbitan Sabtu, 26 Agustus 2006, halaman 11 dan *Harian Pontianak Post*, Selasa, 22 Agustus 2006, halaman 15.

Agar PILKADA Kalbar mampu menghasilkan para pemimpin yang dapat menghilangkan keterpurukan dahsyat – yang saya sebut sebagai ”kabut pekat”-- dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat daerah – yang saya analogikan sebagai menghadirkan ”mentari yang akan terbit di Barat” -- para bakal calon gubernur (Balongub) hendaknya mampu melihat dan memilih wakil mereka dengan menggunakan perspektif geografis, demografis dan etnis. Dengan demikian, rakyat dapat menentukan pilihan mereka dengan memperhatikan keseimbangan geografis, demografis dan etnis.

Tiga Perspektif PILKADA.

Paling tidak ada 6 (enam) Balongub yang sudah terpampang di Harian ini setiap hari, yaitu Akil Mochtar, Barnabas Simin, Buchary A. Rachman, Henri Usman, Usman Ja’far, dan Zulfadli. Akan tetapi proses pencarian, pengelus-elusan dan penemuan Bakal calon Wakil Gubernur (Balonwagub) oleh Balongub sedang berlangsung. Salah satu Balongub – Usman Ja’far – tampaknya telah menemukan dan tetap bersama Balonwagub-nya.

Peranan penting Balonwagub bagi Balongub terletak tidak saja pada saat si Balon telah menjadi calon wakil gubernur (Cawagub) yang akan berjalan beriringan dengan calon gubernur (Cagub)-nya dalam menyempurnakan program kerja untuk disajikan pada berbagai kesempatan kampanye. Selain itu, Cawagub yang mungkin menjadi wakil gubernur (Wagub) difinitif akan berduet dengan dan memberikan banyak ide pemikiran kepada Cagub yang mungkin juga menjadi gubernur difinitif, sehingga pimpinan tertinggi eksekutif merupakan andalan bagi para anggota eksekutif atau birokrat. Fungsi Balonwagub atau Cawagub juga terletak pada fakta di daerah pemilihan dan di mata para pemilih bahwa mereka (Balongub dan Balonwagub) adalah mewakili rakyat pemilih yang notabene berasal dari daerah geografis, penduduk dan kelompok etnis berbeda.

Agar PILKADA KALBAR dapat menghasilkan para pemimpin yang mampu menghilangkan ”kabut pekat” dan menghadirkan ”mentari yang akan terbit di Barat” (Alqadrie, 2006. *Kabut Pekat dan Mentari Terbit Di Barat*), dan sekaligus agar para Balongub dapat menjadi pemenang dalam PILKADA tersebut serta memiliki pasangan yang tangguh, mereka hendaknya mampu melihat dan memilih para wakil mereka dengan menggunakan perspektif geografis, demografis dan etnis. Penggunaa perspektif pertama berkaitan dengan asal daerah dimana Balonwagub mereka berasal,

perspektif kedua berhubungan dengan penduduk yaitu jumlah dan pengaruhnya, dan perspektif ketiga merujuk pada dari kelompok etnis mana Balonwagub yang akan mendampingi Balongub berasal. Penggunaan tiga perspektif ini tidak sama sekali membuat PILKADA berbau primordialisme, tetapi ini berkaitan dengan keseimbangan asal-usul antara Balongub dengan Balonwagub yang pada akhirnya mengarah pad, *power sharing*.

Perspektif geografis berkaitan dengan fakta bahwa kalau Balongub, katakan misalnya Buchary A. Rachman adalah anggota Kelompok etnis Melayu dan berasal dari kawasan pesisir, yaitu Kota Pontianak, maka ia sebaiknya melihat ke kawasan pedalaman jauh (*interior upland*) dalam memilih Balonwagub-nya yaitu seorang yang berasal dari daerah Kabupaten Sintang/ Kapuas Hulu/ Sekadau atau Melawi. Akan tetapi ia harus juga menggunakan perspektif etnisitas dan demografis, yaitu melihat sub-kelompok etnis Dayak pada salah satu dari empat kabupaten yang disebut di atas dan mempertimbangkan pula jumlah penduduk terbesar dan berpengaruh dari sub-sub kelompok etnis yang ada pada empat kabupaten tersebut seperti Iban atau Taman atau Kayan, atau lainnya.

Akil Mochtar, sebagai seorang Melayu dari kawasan pedalaman jauh, jelasnya dari Kabupaten Putussibau, seharusnya tidak menetapkan Balonwagub dari orang-orang yang berasal dari sub-kelompok etnis Dayak apalagi dari kelompok etnis Melayu yang berasal dari kawasan yang sama, jelasnya dari Kabupaten Kapuas Hulu/ Sintang/Melawi. Ia sebaiknya memilih Balonwagub dari orang-orang yang berasal dari kawasan pantai, seperti kawasan Kabupaten Sambas/Pontianak/ Ketapang/ Kota Pontianak/Singkawang, atau kawasan pedalaman dekat (*interior valley*), seperti dari Kabupaten Landak/ Bangkayang. Selain itu ia juga hendaknya memperhatikan perspektif etnisitas dengan mengutamakan anggota sub-kelompok etnis Dayak atau Komunitas Tionghoa yang berjumlah cukup besar dan berpengaruh yaitu seorang sub-kelompok etnis Dayak Kendayan, atau lainnya baik dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota yang disebutkan di atas, atau seorang dari Komunitas Tionghoa di kota Pontianak atau kota Singkawang.

Perspektif ini sama persis dengan, tetapi tidak menjadi suatu keharusan, bagi Usman Ja'far. Ia tampaknya telah mempunyai Balonwagub "abadi" yaitu L.H. Kadir, dan mereka berdua telah berduet selama ini dengan lancar dan konstruktif hingga sekarang.

Lain halnya dengan Barnabas Simin, sampai sekarang ia merupakan satu-satunya dari enam Balongub periode 2007-2012 yang berasal dari kawasan pedalaman dekat, tepatnya Kabupaten Landak. Ia adalah seorang anggota sub-kelompok etnis Dayak Menyuke, berprofesi sebagai pendeta dan merangkap sebagai anggota komisaris PTPN Perkebunan XIII. Untuk memperoleh dukungan penuh baik dalam memenangkan PILKADA maupun dalam memperlancar program kerjanya, dari perspektif etnisitas dan geografis, ia hendaknya dapat menemukan dan merangkul salah seorang dari kelompok etnis Melayu sebagai Balonwagub-nya yang berasal dari kawasan pedalaman jauh, seperti misalnya dari Kabupaten Kapuas Hulu/ Sintang/ Melawi, atau dari kawasan pantai yaitu Kabupaten Ketapang atau Kota Pontianak. Akan tetapi dari perspektif demografi ia harus sampai pula pada pilihan seorang Balonwagub dari penduduk Kota Pontianak, karena kota ini menyediakan SDM relatif lengkap dari berbagai keahlian dan profesi yang dapat mengimbangnya sebagai seorang pendeta.

Perspektif yang harus digunakan Henri Usman dan Zulfadli sedikit mirip dengan yang dipakai Buchary. Kedua Balongub ini berasal dari daerah pesisir, masing-masing dari Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak. Secara implisit mereka berdua adalah Melayu. Agar dapat memenangkan PILKADA 2007 dan mulus dalam perjalanan membangun Kalbar, mereka hendaknya bersedia melepaskan keinginan mereka berduet dengan "urang kite" walaupun Balonwagub itu berasal dari kawasan manapun. Mereka harus dapat menemukan Balon wakil dari 4 (empat) kabupaten dari kawasan pedalaman jauh, khususnya sub-kelompok etnis Dayak yang memiliki jumlah dan pengaruh besar, seperti Iban/ Taman/ Kayan, atau lainnya. Alternatif lain, mereka dapat juga menjatuhkan pilihan pada anggota Komunitas Tionghoa dari kawasan yang sama.

BAB XI

CAPRES GOLKAR DAN SETAHUN PEMERINTAHAN BJ. HABIBIE²

Spekulasi tentang siapa calon presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 1999 terjawab sudah. Akhirnya Rapim Golkar 13-14 Mei 1999, kelanjutan dari rakornas partai tersebut yang diadakan 7 Mei 1999, memutuskan secara aklamasi Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai calon tunggal.

Sebelum keputusan diperoleh, BJ Habibie telah memperoleh dukungan teratas di antara calon lainnya. Duapuluh dua daerah secara langsung mencalonkan namanya sendiri, satu daerah — Bali — abstain, enam daerah mencalonkan lima nama sekaligus — Habibie, Wiranto, Ginandjar Kartasasmita, Sultan Hamengku Buwono X, dan Akbar Tanjung — dan DPD I Timtim mencalonkan paket — Habibie-Wiranto — sebagai capres dan cawapres, sedangkan lima daerah sisanya menyetujui basil rapim. Dengan demikian, BJ Habibie memperoleh dukungan penuh dari 27 DPD I.

Walaupun capres yang selalu bersedia menerima kritikan itu mendapat dukungan mayoritas dalam Golkar, tidak berarti proses tampilnya figur BJ Habibie berjalan mulus. Memang benar, sebagian besar DPD — termasuk para anggota — partai berlambang beringin ini optimis akan performance, kinerja, dan kemampuannya untuk memimpin negara terbesar keempat di dunia yang masih dilanda krisis Mi. Namun DPD Golkar dari Pulau Jawa dan penentangannya di DPP meragukan pencalonan BJ Habibie sebagai faktor positif dalam menyembuhkan krisis di Indonesia maupun dalam mendongkrak perolehan suara Golkar path Pemilu Juni ini.

² Artikel ini telah pernah dimuat dalam *Harian Republika*, terbitan *Senin*, 24 Mei 1999, halaman 4.

Pihak-pihak yang meragukan kemampuannya maupun simpatisannya menyatakan tidak ada jalan lain bagi BJ Habibie kecuali membuktikan kepada para penentangannya di dalam dan di luar Golkar bahwa ia bukan faktor negatif bagi perolehan suara di partai beringin itu (Kompas, 15/5 1999). Bahkan salah seorang penentangannya dari DPP Golkar tidak menyetujui rapim menyebut nama BJ Habibie sebagai capres sebelum pemilu. Bila rapim melakukannya sebelum pemilu, Golkar akan di tinggalkan mainstream dan suaranya akan anjlok.

Namun, sebagian terbesar pendukungnya — baik di DPP maupun di DPD — berpendapat lain: Bahwa BJ Habibie, yang telah go international dan memiliki nilai jual yang justru bukan di Pulau Jawa itu —perlu memperoleh pijakan politis path Golkar yang mencalonkannya. Mereka yakin, dengan demikian Golkar mampu mempertahankan perolehan suaranya dan BJ Habibie akan menjadi presiden definitif RI yang keempat.

Tulisan ini tidak bertujuan untuk berpolemik tentang partai mana yang akan memenangkan Pemilu 1999 dan siapa yang akan menjadi presiden terpilih kelak, tetapi mencoba mengungkapkan mengapa para pendukung BJ Habibie merasa optimis dengan pencalonannya sebagai capres dan percaya bahwa pencalonannya itu mengandung faktor positif, baik bagi perolehan suara Golkar maupun bagi kemajuan bangsa ini.

Ketidakterseriusan demokratisasi

Suasana era reformasi saat tampilnya BJ Habibie sebagai presiden penuh dengan pereobaan yang mempengaruhi popularitasnya sebagai presiden di mata rakyatnya. Berbagai hujatan dan tuduhan terhadapnya sebagai tidak reformis bahkan terlibat KKN, berhamburan menghantamnya selama setahun memimpin bangsa ini. Ia dianggap berada di bawah bayang-bayang Soeharto dan bagian dari kekuatan yang mempertahankan status quo, sehingga ia mengalami kesulitan untuk membersihkan KKN dan membawa Soeharto beserta keluarga dan kroni-kroninya ke pengadilan. Penyadapan telepon terhadap pembicaraan antara BJ Habibie

dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib, yang sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya, ingin membuktikan ketidakseriusannya menangani kasus tersebut.

Sebelum ditunjuk sebagai presiden, ia dianggap telah mengadakan lompatan "terlalu" jauh dalam industrialisasi — yang dianggap berbiaya mahal. Karena itu, banyak pengeritiknya khawatir, dalam jabatannya sebagai presiden — baik pada masa transisi apalagi dititip — BJ Habibie dianggap "tidak" akan banyak bermanfaat bagi perbaikan dan kemajuan bangsa ini di masa mendatang.

Di sisi lain, berbagai optimisme dan pujian terhadap BJ Habibie berdatangan dari berbagai kalangan, baik yang berasal dari daerah luar Jawa maupun dari Pulau Jawa. Sebagian dari suara-suara optimisme itu tampaknya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Akbar Tanjung dan Dewi Fortuna Anwar:

Bahwa BJ Habibie orangnya terbuka, demokratis, komunikatif, dan berpengalaman di pemerintahan dan politik, serta memiliki visi yang jelas tentang masa depan Indonesia, telah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi-makro, mendorong proses demokratisasi secara berarti, dan menggulirkan proses penyelesaian Timtim yang sangat positif (Republika, 15/4/1999). Ini merupakan modal baginya dalam menyelesaikan semua pekerjaan rumah, termasuk memulihkan keterlibatan hukum dan kemasyarakatan yang belum terselesaikan.

Satu hal yang sangat melegahkan, kata Arif Punto Utomo (dalam "Ekbis" Republika 17/5/-1999) adalah bahwa dalam kepemimpinan BJ Habibie, ternyata perekonomian kita tidak jadi terkapar sebagaimana diramalkan oleh sebagian pengamat ekonomi. Bahkan kehadirannya ternyata memperlancar proses keterbukaan, memperbaiki berbagai krisis yang melanda negeri ini selama lebih dari setahun.

Beberapa pihak, sebagaimana dicetuskan oleh AM Saefuddin, menilai BJ Habibie sebagai negarawan yang sudah teruji ("Akcaya" Pontianak Post, 17/5/1999). Dengan demikian, ia diperkirakan mampu mendongkrak perolchan suara Golkar pada PeMiLu Juni ini.

Selain itu, tampilnya BJ Habibie sebagai presiden dianggap oleh pendukungnya sebagai suatu "kebangkitan" dan "kebanggaan" bagi orang-orang Indonesia di luar Jawa, terlepas dari keyakinan agama dan kelompok etnis mereka. Di Pulau Jawa sendiri, khususnya mereka yang beragama Islam, lebih khusus lagi mereka yang berada pada basis-basis pesantren beserta para kawula muda mereka seperti santri dan ustadz, BJ Habibie dipandang sebagai simbol dari kebangkitan dan kemajuan Islam.

Perasaan dan kebanggaan seperti ini dirasakan juga oleh kebanyakan umat Islam, tidak hanya di Taman Air tetapi juga di Asia Tenggara bahkan sebagian besar negara sedang berkembang. Produksi pesawat terbang, kendaraan roda empat, kapal laut, industri senjata, dan pengembangan kota industri Batam, yang diilhami dan diarsiteki oleh BJ Habibie telah menimbulkan kesetiakawanan Islam dan kesadaran kelompok etnik non-Barat.

Tingginya nilai jual yang dimiliki BJ Habibie di dunia internasional telah menambah kepercayaan diri bangsa Indonesia. Dan ini sekaligus dapat mencegah bila AS meninggalkan Indonesia; dan Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi, maka Indonesia memiliki alternatif lain untuk merangkul negara-negara Arab kaya dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), khususnya Jerman, dengan menggunakan nilai jual itu. Tampaknya Jerman telah siap untuk itu.

Perubahan afiliasi politik

Banyak pengamat dari luar Pulau Jawa melihat keputusan GolKar mencalonkan BJ Habibie sebagai CaPres tunggal sebagai keputusan yang tepat. Keputusan ini bukar saja akan menggalang perolehan suara di kalangan GolKar sendiri, tetapi juga akan memperoleh dukungan dari TNI dan Polri beserta keluarga mereka, maupun masyarakat pemilih di luar partai berwarna kuning ini. Banyak pengamat PeMiLu luar Jawa percaya bahwa apa yang dialami oleh Presiden John Kennedy dan Bill Clinton, dua CaPres dari Partai Demokrat yang juga dipilih oleh sebagian besar pemilih dari Partai Republik, diperkirakan akan terjadi pula pada BJ Habibie pada Pemilu 1999.

Penulis memperkirakan bahwa para pemilih dari luar GolKar cenderung akan memilih partai beringin ini bukan atas dasar afiliasi politik dan ideologis, tetapi lebih pada pertimbangan figur BJ Habibie maupun pada kesadaran, kesetiakawanan, dan kebangkitan umat Islam, serta masyarakat luar Jawa. Dua kelompok ini, Islam Indonesia dan masyarakat di Iuar Pulau Jawa, mendambakan pemimpin yang memiliki perhatian besar pada peranan umat Islam yang menentukan, tetapi masih dibuat terpuruk dan pada otonomi daerah yang tidak(pernah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pusat sejak kemerdekaan.

Oleh karena itu, partai-partai Islam dan parpol lainnya yang menginginkan reformasi bergulir tanpa membuat bangsa ini terpecah belah dan terpuruk di bawah kaki negara besar, seharusnya menjadi bertambah jeli terhadap kecenderungan positif di atas, sehingga bersedia mengadakan koalisi dengan GolKar. Dengan demikian, sebagian besar pendukung mereka tidak perlu menyeberang dan tetap memilih partai-partai tersebut dalam PeMilu mendatang.

Hipotesis di atas, perubahan pada afiliasi — dari politik dan ideologis ke figur pribadi — akan terjadi seandainya GolKar dan TNI terus melangsungkan reformasi mendasar dan BJ. Habibie secara terus meneius merealisasikan reformasi dalam segala bidang — termasuk bidang keamanan, masalah KKN, dan pemberdayaan hukum.

BAB XII

PROSES PERJALANAN BALONPRES DALAM PILPRES 2004: WIRANTO BALONPRES GOLKAR MENGUBAH PETA PERPOLITIKAN INDONESIA³

A. BAGIAN 1

Kemenangan Wiranto (W) sebagai Capres dari konvensi Partai Golongan Karya (PG) tidak terlalu mengejutkan, tetapi hanya sedikit membuat *surprise*, karena ia mampu mengalahkan lawan-lawan beratnya -- para bakal calon presiden (Bacapres) lainnya -- dalam konvensi PG seperti Prabowo (P), Aburizal Bakrie (AB), Surya Paloh (SP), dan Akbar Tanjung (AT).

Memahami Psikologis Massa dan Ingin Tetap Berkibar.

Keheran itu mungkin mengandung empat hal: (1) W dianggap sebagai figure Capres yang kuat, sekuat figure Capres lainnya, walaupun dikhawatirkan ia akan “mengembalikan” Dwi Fungsi (DF) ABRI dan dianggap pelanggar HAM. (2) Kemenangan W sebagai Capres menunjukkan bahwa PG sangat matang dalam perpolitikan nasional, terutama dalam mencari kandidat profesional, relatif bersih dan figure yang berwibawa dan diperkirakan mampu menyaingi figure Susilo Bambang Yudoyono (SBY). (3) PG juga berhasil memahami psikologis politik massa yang berada dalam transisi antara tuntutan Demokrasi -- menghargai perbedaan dan keberagaman -- dengan era dimana rasa aman disamping kesejahteraan masih menjadi idaman. (4) Partai ini cukup lihai dalam berpolitik, siapaun yang menang baik W maupun SBY-- tentu Yusuf Kalla (YK),

³ Artikel ini sebagai prediksi terhadap Wiranto dalam proses pencalonannya sebagai Bakal Calon Presiden (BaLonPres) telah dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Rabu, 12 Mei 2004, pada ruangan Opini, halaman 26.

Cawapresnya ikut terangkat -- partai peringkat pertama ini tetap saja makin tinggi berkibaran.

Keunggulan W dalam konvensi itu tidak mengejutkan, karena ketika saya menjadi pembedah tunggal autobiografinya ***Bersaksi Di Tengah Badai*** (Azhari, 2003) di Universitas tempat saya mengajar, 16/6 2003, saya (Alqadrie, 2003) menemukan di dalam buku tersebut suatu pengakuan W bahwa kebenaran itu hanya satu. Ini berarti, bukan maksud W di dalam pengakuannya itu, untuk mencari-mencari kebenaran sendiri atau fihak tertentu dengan membongkar-bongkar kesalahan fihak lain. Tapi, ia ingin meluruskan sejarah seperti tekad kita semua untuk tidak meninggalkan sejarah. Kehad ^{asa} lalu yang benar dan lurus -- bukan “dibenarka ¹ “diluruskan”, karena dipaksakan oleh kekuasaan ^{ritas} -- memang sangat perlu diungkapkan dalam membangun bangsa yang besar dan berwibawa. Tanpa pelurusan sejarah, suatu bangsa akan menjadi terpuruk, bisa-bisa kondisi seperti itu menghasilkan kebringasan dan krisis dimensional, khususnya krisis kepercayaan, yang berkepanjangan, yang telah terbukti sekarang.

Badai Sedang, Akan Atau Sudah Berlalu?

Saya menemukan secara implicit psikologis di dalam bukunya bahwa walaupun seandainya ia tidak tampil sebagai pemenang sebagai Capres PG dalam konvesi tersebut, ia tampak juga akan memenangkan hati sebagian rakyat Indonesia, khususnya hati pembaca buku kesaksiannya, Mengapa? (1) ia tidak melakukan tindakan kudeta militer pada saat peralihan kekuasaan pemerintahan dari Soeharto (S) ke B.J. Habibie (BJH), sedangkan ia berada pada posisi yang memungkinkan untuk itu dan kemungkinan besar ia akan didukung oleh militer kalau ia melakukannya -- sebagaimana diakui oleh banyak pengamat Barat di dalam bukunya. Ini mungkin merupakan sebab mengapa AS tidak berkeberatan ia menjadi Capres, padahal setahun yang lalu, AS masih menuduhnya sebagai pelanggar HAM terberat. (2) Wiranto adalah salah seorang yang pertama dari banyak petinggi ABRI yang meluruskan dan mendukung perpindahan

kekuasaan dari pemerintahan otoriter militeristik ke demokrasi di bawah supremasi sipil. Walaupun ada keraguan dan kekhawatiran atas dirinya sebagai orang kuat ORBA ia akan “mengembalikan” Orde otoriter dan Dwi Fungsi (DF) setelah ia berkuasa, namun kesaksian di dalam autobiografinya, menggugurkan kekhawatiran semacam itu.

Anak seorang guru SD yang dibesarkan dengan kesederhanaan di dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, bukan saja menjadikan ia dan keluarganya begitu agamais dan rendah hati -- bahkan hampir seluruh keluarganya tidak pernah lepas dari jilbab -- tetapi juga menjadikan W tidak menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya pada saat penggantian kekuasaan pemerintahan tersebut. Sebaliknya, ia mengamankan penggantian kekuasaan itu dengan mendukung BJH, bahkan ia merupakan salah seorang yang mereformasi ABRI.

Persaingan Sengit: Kelebihan dan Kekurangan.

Kemunculan W sebagai Capres dari PG akan menambah sengitnya persaingan antara dia dengan paling tidak 3 (tiga) Capres lainnya, Megawati Soekarnoputeri (MS) yang mungkin didampingi oleh Hamzah Haz (HH), SBY didampingi oleh YK, dan Amin Rais (AR) didampingi oleh SiswonoYudo Husodo (SYH) dalam perebutan kursi RI 1 pada tanggal 5 Juli ini.

PROSES PERJALANAN BALONPRES DALAM PILPRES 2004: HASYIM MUZADI DAN NU ADALAH KARTU AS

B. BAGIAN 2

Keempat Capres ini, yang mungkin akan ditambah lagi dengan Abdurrahman Wahid (AW) -- kalau tidak terganjal persyaratan kesehatan -- mempunyai peluang yang sama besar. Ia dianggap saingan berat SBY, karena dalam birokrasi militer, ia dianggap “diuntungkan” oleh status senioritasnya. Namun, di dalam persaingan yang menjunjung asas demokratis, anggapan seperti itu diperlemah oleh fakta demokratis bahwa semuanya berpulang pada rakyat sebagai pemilih. Apapun terjadi, itu adalah realitas politik, yang menepis keraguan beberapa pihak tentang asal usulnya -- dari militer dan pernah menjadi ajudan Soeharto.

Kelebihan dan Kekurangan.

Kelebihan lainnya dalam diri W – menurut banyak pengamat – adalah bahwa ia memiliki keterlibatan cukup banyak dalam pengambilan kebijakan pada tingkat nasional dan internasional selama ia masih berada baik sebagai PANGAB maupun sebagai Menteri Pertahanan. Pengalaman semacam itu akan banyak membantunya dalam kedudukan sebagai RI 1, seandainya ia menjadi pemenang. Kelemahan utama, sebagai dilihat sebagian pengamat, antara lain adalah sebagai orang lapangan ia dianggap akan terlalu berfikir teknis (*technical thinking*) dan “kaku” dengan kurang memiliki aspek *team player*, intelektualitas dan faktor social lainnya.

Ini berbeda dengan SBY, walaupun ia kurang berpengalaman dan jarang terlibat dalam pengambilan kebijakan tingkat tinggi di tingkat nasional dan nasional, tapi ia dipandang lebih memiliki wawasan di bidang intelektualitas dan pembinaan sosial sehingga banyak ditugaskan pada tugas-tugas di luar kemeliteran. Selain itu, W tampaknya lebih banyak mendapat dukungan dari Luar Jawa, apalagi

dari PG yang tentu akan *all out* mendukungnya. Sedangkan *Proses Perjalanan Balonpres Dalam Pilpres 2004: Hasyim Muzadi Dan Nu Adalah Kartu As*

dukungan kepada SBY lebih banyak datangnya dari Jawa dan Jakarta., dan ia lebih tergantung pada figure pribadinya – sebagai seorang yang pernah “teraniaya” -- yang mencuat dari keberhasilan baik sebagai pejabat yang bersih dan tidak terlalu “meliteristik, tapi mungkin ia sedikit mengalami kesulitan sebagai Capres yang berasal dari partai baru muncul. Akan tetapi para pengamat PilPres masih melihat kesempatan menjadi orang nomor 1 di dunia masihimbang antara W dengan SBY.

Oleh karena itu, walaupun hal-hal tersebut di atas dapat dipandang sebagai “kelemahan” dan “kelebihan” yang dimiliki keduanya, keberhasilan mereka, W dan SBY, baik dalam memenangkan pertarungan sebagai RI 1 maupun dalam membuat tugas pemerintahan efektif, tergantung pada siapa Cawapres yang mereka pilih.

Siapa tidak terbendung? Siapa Membendung Siapa?

Lamaran SBY terhadap Yusuf Kalla (YK) sebagai Cawapres merupakan pilihan yang tepat baik secara pribadi -- YK memiliki kompetensi untuk itu, Islam yang taat dan berasal dari kawasan Irian (Papua), Ambon, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan (Iramasuka), pada mana rakyatnya mendambakan RI 1 atau RI 2 tidak hanya berasal dari Jawa -- maupun secara organisatoris, berasal dari partai besar pemenang Pemilu. Untuk lebih meyakinkan pengikutnya sekaligus keluar sebagai pemenang dalam pertarungan 5 Juli nanti, W sebaiknya didampingi oleh Cawapres yang memiliki kualitas kepribadian yang tinggi, berasal dari partai atau kelompok Islam yang memiliki dukungan cukup besar, kader yang dicintai rakyat, dan dari kawasan dimana W mendapat banyak dukungan. Walaupun, W tidak dapat memperolehnya dari kalangan PKB, saya kira Hasyim Muzadi (HM) secara pribadi akan setuju mendampinginya.

Munculnya W sebagai Capres dari PG menyebabkan bahwa prediksi sebelumnya dari banyak pengamat yang

berpendapat jalan SBY menuju RI 1 tidak terbendung, berubah total. Tapi, sebaliknya mereka memperkirakan W akan mampu membendung SBY. Prediksi ini didasarkan pada dua hal: (1) para pengikut PG akan lebih suka menempatkan jago mereka pada RI 1 -- W -- ketimbang RI 2 -- YK -- apapun alasannya, karena pada Pemerintahan sebelumnya, kader PG -- AT -- hanya kebagian Ketua DPR RI; (2) Kemungkinan AW akan terganjal dan dia tidak akan merelakan kadernya -- HM -- mendampingi W, PG perlu mengadakan pendekatan terhadap pengurus dan kyai NU yang melihat kepentingan yang lebih luas untuk “meminjamkan” HM untuk mendampingi W sebagai Wacapres. HM dan NU adalah kartu As yang akan menentukan kemenangan W, karena HM tokoh pertama dan utama di kalangan NU, selain AW, dan NU punya basis kuat di Jawa Timur dan hampir semua pedesaan di Jawa.

Kalaupun lamaran W kepada HM terhalang, W sebaiknya tidak berdampingan dengan kader PG sebagai Cawapres. Walaupun PG keluar sebagai Pemenang Pemilu 2004, persentasenya berkurang dibanding dengan perolehan PeMilU 1999, sehingga walaupun W muncul sebagai pemenang RI 1, tanpa berkoalisi dengan partai lain pemerintahannya tidak akan efektif. Di lembaga Legislatif ia akan menghadapi sandungan.

Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, PG harus berkoalisi, khususnya dengan NU atau partai Islam lainnya dengan melamar HM atau Solahuddin Wahid (SW) atau walaupun Hidayat Nur Wahid (HNW) berkeberatan, bisa dengan kader lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demi kepentingan nasional yang lebih luas ditambah lagi dengan kepribadian W yang supel, religius dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh, W akan memperoleh salah seorang Cawapres diantara mereka.

Dengan didampingi Cawapres dari kalangan ini, W diperkirakan akan memperoleh dukungan massa yang lebih besar dari partai yang memiliki platform baik berdekatan dengan PG, seperti antara lain PKPB, PKPI, PPKD, PP Pancasila, PPD, PPIB dan PNBK, PNIM yang diperkirakan tidak berkoalisi dengan PDI-P, maupun berdekatan atau

bersimpati dengan NU, seperti massa dari PBB,PBR, PPNU dan PSI. Selain itu, koalisi seperti itu diperkirakan akan tercipta hubungan simbiosis dan *take and give*, dimana PG akan memanfaatkan sentimen massa Islam, sedangkan NU akan banyak memiliki pengaruh dan mewarnai partai yang dianggap sekuler ini untuk menjadi lebih agamais.

BAB IX

PREDIKSI CAPRES-CAWAPRES DALAM PEMILU 2004: AMIEN - SISWONO MASUK PUTARAN KE DUA (?)

A. BAGIAN 1

Lima pasang Capres dan Cawapres yang akan tampil di kompetisi demokratis 5 Juli ini: Megawati Soekarnoputeri (MS) dengan Hasyim Musadi (HM), Wiranto (W) dengan Solahudin Wahid (SW), Susilo Bambang Yudoyono (SBY) didampingi oleh Yusuf Kalla (YK), Hamzah Haz (HH) dengan Agum Gumelar (AG), Amin Rais (AR) dengan Siswono Yudohusodo (SY), membuat persaingan memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2 tetap saja sangat menarik dan sukar diramalkan pemenangnya.

Pertanyaan yang muncul sekarang: Pasangan manakah yang akan keluar sebagai pemenang langsung pada putaran pertama dari lima pasangan yang ada? Saya memprediksikan tidak ada Capres dan Cawapres yang akan menang langsung pada putaran pertama. Kalau begitu pasangan manakah akan masuk pada putaran kedua? Saya setuju dengan hasil jajak pendapat yang disiarkan oleh SCTV Minggu malam, 23/5-2004, bahwa AR dan SY akan menjadi pasangan pertama berhasil masuk putaran kedua. Untuk pasangan kedua yang akan masuk pada putaran kedua, saya tidak setuju dengan hasil jajak pendapat tersebut, tetapi lebih percaya bahwa W dengan SW tampaknya akan berjaya mendampingi pasangan pertama untuk berlaga di putaran kedua. Pertanyaan berikut adalah mengapa dua pasangan ini yang akan tampil?

Kelebihan dan Kekurangan.

Sejak menjabat RI 1, MS berhasil mempertahankan Papua dan Aceh dalam pangkuan NKRI, menurunkan status Darurat Militer menjadi Darurat Sipil di Aceh, dan

memperkecil tingkat laju inflasi. Ia berhasil mempertahankan RI tidak terseret ke dalam persekongkolan dengan AS baik dalam mengaburkan pengertian "terorisme" maupun dalam penjajahan baru di Iraq. MS juga berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan sebesar 4,8 % pertahun, namun gagal memperkuat nilai tukar Rupiah atas Dollar pada level Rp.8.000.00-an, bahkan nilai Rupiah terus menurun. Sebaliknya MS tidak mampu mencegah campur tangan "first gentlement"-nya dalam pemerintahannya, yang menyebabkan seorang Menteri Koordinatornya "teraniaya", tidak juga ia mampu mencegah tindakan pengusuran terhadap pemukiman wong cilik, sehingga simpati sebagian besar rakyat berkurang terhadapnya.

Kehadiran HM menggandeng MS tampaknya mampu menghapus dikotomi Islam Santri vs Islam Abangan, dan mewarnai PDI-P -- yang dianggap sekuler dan dikelilingi "preman" -- agar berperilaku politik lebih Islami. Sebagian besar massa PDI-P dan NU berpendidikan rata-rata SLTP ke bawah dan bermata pencaharian petani kecil, pedagang kaki lima dan pedagang kecil, tukang, buruh, dan kelas Marhaenis lainnya. Kehadiran HM diperkirakan dapat mengangkat keterpurukan bangsa ini, terutama di sektor kesejahteraan, pendidikan dan mentalitas. Jadi, "Dwi Tunggal" MS dan HM dapat menjadi daya tarik bagi rakyat pada 5 Juli mendatang, namun sayangnya HM tidak mendapat restu dari AW dan Kyai Sepuh NU maupun PKB. Kabarnya ia dan MS hanya didukung oleh para Kyai dari 120 pondok pesatren (Ponpes) NU dari seluruh Indonesia (Media Indonesia, 27/5-2004:1), dan PKB secara resmi tidak berkoalisi dengan PDI-P sehingga tidak mendukung mereka (Kompas, 27/5-2004:1).

HH adalah politikus kawakan, mulanya prominan NU yang memulai karirnya dari anggota DPRD Kalbar. Karena kepiawaiannya dalam hal anggaran dan sektor keuangan lainnya, ia ditarik oleh PPP menjadi anggota DPR RI dan MPR RI mewakili DKI Jakarta. Pengalamannya sebagai Wapres, ditambah dengan reputasi pendampingnya, AG, yang pernah menjadi Menteri sejak pemerintahan B.J. Habibie (BJH), AW dan MS, sampai sekarang Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Lemhanas dan Ketua Umum KONI Pusat, menyebabkan

pasangan ini dapat menjadi batu sandungan bagi pasangan lain. Mereka diperkirakan akan mendapat dukungan dari anggota dan simpatisan PPP, partai-partai kecil berbasis Islam lainnya yang memiliki platform relatif sama, seperti PNU, PSI, serta simpatisan AG dari berbagai kalangan, termasuk sebagian anggota PG dan IKA Lemhanas.

Partai Demokrat (PD) yang baru berumur dua tahun telah dapat disejajarkan dengan partai lainnya. Ini disebabkan PD mencalonkan SBY yang memiliki kelebihan tidak saja dari dalam dirinya seperti berwibawa; bersih; tidak berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, Timtim dan Trisaksi; berasal dari keluarga Islam taat dan dari lingkungan pesantren; dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Kelebihannya juga berasal dari luar dirinya yaitu pengalaman psikologi politik -- mantan Jenderal ADRI dan masih aktif menjadi Menteri Koordinator -- pernah "teraniaya".

Melalui peristiwa itu SBY ternyata memperoleh simpati rakyat, terutama dari DKI Jaya, dengan melonjaknya perolehan suara PD menduduki tempat kedua setelah PKS. Pengalaman psikologis politik -- pernah dialami sebelumnya para pengurus PDI-P, terutama MS -- ternyata dialami pula oleh SBY. Tampaknya rakyat Indonesia masih bersimpati kepada orang teraniaya. SBY diperkirakan mengulangi kepopuleran MS melalui pengalaman pernah teraniaya. Akan tetapi ia dianggap kurang berpengalaman dalam posisi pengambil kebijakan nasional dan internasional.

YK adalah seorang pengusaha berhasil, memiliki kepedulian, integritas tinggi, dicintai rakyat kecil, terutama yang dilanda bencana. Sebagai Menteri Koordinator bidang Kesra, ia begitu sigap berada pada kesempatan pertama di kawasan bencana dimana rakyat memerlukan bantuan. YK berasal dari kawasan gabungan luar Jawa dan Sumatera -- Irian, Maluku, Ambon, Sulawesi, dan Kalimantan (IRAMASUKA) -- yang merindukan pemimpin nasional tidak hanya berasal dari Jawa dan Sumatera. Begitu sukacitanya rakyat di kawasan ini menyambut kehadiran BJH di kursi RI 1 yang dinilai berhasil mendasari Demokrasi dan menaikkan nilai rupiah sampai level Rp. 6.000,00an dari Rp. 15.000,00an

per dollar, dan mencuatnya HH di kursi RI 2. Berhubung tidak dalam posisi ikut mengambil kebijakan nasional, HH diperkirakan "melupakan" daerahnya sendiri, sehingga mengecewakan rakyat di situ. Kehadiran YK mengulangi antusiasme di IRAMASUKA, dan diperkirakan akan lebih mendongkrak kepopuleran figure SBY. Sebelumnya tersebar SMS tentang kepopuleran dan dukungan terhadapnya, SBY, tetapi begitu W muncul sebagai Capres, dukungan tersebut beralih kepada W.

Pasangan Underdog, Ancaman Terhadap Capres dan Cawapres Lain.

SY berasal dari non partisan dan seorang Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang memiliki anggota tidak kurang dari 5 juta orang -- jumlah yang kecil. Ditambah dengan massa simpatisannya di luar HKTI, keluarga besar dan massa pendukung PAN, AR dan SY bukan mustahil akan mempersulit pasangan lain, dan kemudian berhasil merebut kursi RI 1 dan RI 2 sebagaimana hasil jajak pendapat SCTV. Pasangan AR dan SY dianggap sebagai "underdog", namun mereka berdua dan para pendukung mereka begitu optimis akan memenangkan pertarungan 5 Juli ini. Walaupun AR dianggap beberapa kalangan hampir tidak berbuat banyak ketika ia menjabat sebagai Ketua MPR RI, namun ia dan partainya, PAN, masing-masing dikenal sebagai seorang yang bersih, memiliki integritas tinggi, figure yang mampu mengkombinasikan intelektualitas dan politisi merakyat, dan sebuah partai yang reformis dan konsisten untuk memerangi KKN. Ia bertekad akan mengundurkan diri bila gagal menghapuskan KKN (Media Indonesia, 29/5-2004:1). AR memilih SY sebagai Cawapresnya, karena SY dikenal sebagai figure yang memiliki integritas juga tinggi dan bertekad merealisasikan obsesinya, membuat RI tidak berhutang lagi.

PREDIKSI CAPRES-CAWAPRES DALAM PEMILU 2004: WIRANTO – WAHID MENUJU KE PUTARAN KE 2 ?

B. BAGIAN 2

Memahami Psikologis Massa dan Tetap Berkibar.

Banyak pengamat kurang sefaham dengan kekhawatiran bahwa W akan "mengembalikan" Dwi Fungsi (DF) ABRI, telah dan akan melanggar HAM. Mereka beranggapan penguasa mantan militer dapat lebih demokratis dan penguasa sipil dapat juga militeristik. Negara sedang terpuruk dalam berbagai bidang, termasuk hukum, mendambakan pemimpin nasional yang kuat, bersih dan demokratis.

Dukungan PG terhadap W menunjukkan bahwa partai ini matang dalam perpolitikan nasional, terutama dalam mencari figure professional, memiliki integritas tinggi dan berwibawa. PG juga berhasil memahami psikologis politik massa yang berada dalam transisi antara tuntutan Demokrasi -- menghargai perbedaan dan keberagaman -- dengan era dimana rasa aman disamping kesejahteraan masih menjadi idaman. Meskipun keduanya -- W dan YK, Cawapres SBY -- merupakan kader PG yang tangguh, partai ini diperkirakan akan mendukung W, lebih memilih berkibar bersama Presiden, daripada berkibar bersama Wapres. Sebagian terbesar mantan anggota ABRI, keluarga ABRI, kepolisian dan simpatisan mereka, lebih cenderung berdiri difihak W daripada di fihak SBY dan di fihak AG sebagai Cawapres dari HH -- walaupun ia adalah anggota PG, dan juga mantan anggota ABRI.

Walaupun seandainya W "tidak menjadi" Capres dalam konvensi PG, saya menemukan secara implicit psikologis kondisi masyarakat pada saat peralihan kekuasaan pemerintahan dari Soeharto (S) ke BJH bahwa W tampaknya telah memenangkan hati sebagian rakyat Indonesia, khususnya hati peserta konvensi. Mengapa? W tidak melakukan tindakan kudeta militer pada saat peralihan

kekuasaan tersebut, sedangkan ia berada pada posisi yang memungkinkan untuk itu dan kemungkinan akan didukung oleh militer kalau ia melakukannya. Ini mungkin merupakan sebab mengapa AS tidak berkeberatan ia menjadi Capres, padahal setahun yang lalu, AS masih menuduhnya sebagai pelanggar HAM terberat. W adalah salah seorang dari banyak petinggi ABRI yang melakukan reformasi di tubuh ABRI, mendukung perpindahan kekuasaan dari pemerintahan otoriter militeristik ke demokratis di bawah supremasi sipil. Anak seorang guru SD yang dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang sederhana dan taat beragama, bukan saja menjadikan W dan keluarganya begitu agamais dan rendah hati -- bahkan hampir seluruh keluarganya tidak pernah lepas dari jilbab -- tetapi juga menjadikan W tidak menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya..

Dalam birokrasi militer, ia dianggap "diuntungkan" oleh status senioritasnya atas SBY. Namun, di dalam persaingan yang menjunjung asas demokratis, anggapan seperti itu diperlemah oleh fakta demokratis bahwa semuanya berpulang pada rakyat sebagai pemilih. Apapun terjadi, itu adalah realitas politik. Kelebihan lainnya dalam diri W, menurut banyak pengamat, adalah bahwa ia memiliki keterlibatan cukup banyak dalam pengambilan kebijakan pada tingkat nasional dan internasional selama ia masih menjabat sebagai KASAD, PANGAB maupun Menko POLKAM. Pengalaman semacam itu akan banyak membantunya dalam memenangkan perjuangannya memperoleh kursi RI 1.

Menurunnya jumlah suara PDI-P, PKB, PPP, menimbulkan konsekuensi sulitnya pasangan MS - HM dan pasangan HH - AG untuk masuk ke putaran kedua. Kemenangan PG secara nasional, walau dengan prosentase menurun, juga menimbulkan konsekuensi bahwa prediksi dari banyak pengamat dan sas-sus dari peserta roundtable discussion yang diselenggarakan oleh IKA LEMHANNAS KSA VII April yang lalu tentang kemungkinan masuknya W pada putaran kedua, cenderung akan terwujud. PG tentu akan lebih all out mendukungnya dibanding dukungan yang diberikan kepada YK.

NU dan PKB Tetap Berkibar.

Sebagai mantan Ketua Komnas HAM, keputusan SW mendampingi W sebagai Cawapres, menggugurkan keraguan fihak-fihak yang mengkhawatirkan akan bangkit kembali ORBA, militerisme dan pelanggaran HAM. Kehadirannya disisi W memungkinkannya, para Kyai dan anggota NU, mengontrol tidak terjadinya kecenderungan negatif itu. Kehadiran SW mendampingi W, yang notabene atas persetujuan AW dan para Kyai Sepuh NU, akan memperoleh dukungan lebih banyak dari sebagian terbesar keluarga besar NU dan juga dari sebagian besar keluarga PKB, dibanding dengan dukungan yang diberikan kepada HM, yang tidak memperoleh dukungan dari AW, dan kepada HH, prominen dan mantan orang kuat NU. Lagipula, AW pernah mengatakan secara implicit dan dibenarkan oleh MDI yang akan menjadi Cawapresnya bahwa bila pencalonan mereka terganjal alasan kesehatan, AW tidak akan melarang anggota NU dan PKB mendukung W dan SW. MDI sendiri dan seluruh anggota PG di Sulsel akan memindahkan suara mereka ke pasangan W dan SW, tidak kepada YK dan AG. Kenyataan ini boleh jadi akan terwujud, karena W dan SW telah minta dukungan secara resmi kepada para Kyai NU dan PKB, dan mereka akan mendukung. Lagi pula PG secara resmi telah berkoalisi dengan PKB (Republika, 29/5-2000:1). Dari dukungan yang diberikan oleh PG, PKB dan NU serta partai-partai kecil lainnya seperti PKP, PNBK, PPD dan sebagainya, kepada W dan SW, prediksi saya pasangan ini, kalau tidak skenario yang ada tidak berubah, boleh jadi akan masuk pada putaran kedua.

BAB X

PEMILIHAN BUPATI SAMBAS, MURI DAN KEBIJAKAN YANG “TIDAK POPULIS”⁴

PENGANTAR⁵

Bupati dan Kebijakan Tidak Populer (dalam *Equator*, 23/5-2006)

Oleh: **Rosadi Jamani**

Kata populis atau populer saat ini sering disalahartikan sebagai kebijakan yang menyenangkan orang-orang disekitar bupati atau kelompoknya saja. Semestinya, populis itu diartikan sebagai kebijakan yang berfihak kepada rakyat.

Kenapa bupati Sambas kembali berkuasa? Karena kebijakan yang diambilnya selama ini tidak “populer.” Bupati Sambas menang, karena kebijakannya “tidak populer.” Artinya, dia tidak begitu memperhatikan orang-orang disekitarnya, namun lebih memperhatikan rakyatnya. Inilah yang saya katakan tidak populer dalam tanda kutip (“ “), kata guru besar Ilmu Sosiologi Politik UNTAN, Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc., saat memberikan kuliah di kelas Ilmu Politik Magister Ilmu Sosial, UNTAN, kemarin.

Lanjut Syarif, rakyat sangat menentukan. Pemimpin yang berfihak kepada rakyat, yakinlah dia akan dipilih kembali. Kalau pemimpin hanya memperhatikan keluarga, golongannya saja, yakinlah dia tidak akan dipilih rakyat. Rakyat semakin hari semakin cerdas dalam menilai pemimpinnya. Jika ada kebijakan yang tidak berfihak kepada rakyat, itu akan menjadi bumerang bagi pemimpin tersebut.

⁴ Artikel ini pernah dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan 17 Mei 2006, pada ruangan Opini, halaman 14

⁵ Tulisan ini yang saya jadikan Pengantar pada bab ini ditulis oleh Rosadi Jamani (watwan *Equator*) dan pernah dimuat dalam *Harian Equator* dengan judul “Bupati dan Kebijakan Tidak Populis,” terbitan *Selasa, 23 Mei 2006*, halaman 4.

“Saya memuji Bupati Sambas, bisa menang karena ia sangat dekat dengan rakyatnya. Dia tidak membedakan orang, bersifat terbuka, ramah dan punya ide cerdas untuk memajukan daerahnya,” urai Syarif.

Sayang, Syarif tidak sedikitpun menyinggung persoalan PilKaDa Landak. Namun, apa yang disampaikan oleh dosen yang enam tahun belajar di Amerika Serikat itu, sangat berguna untuk pemimpin yang akan bertarung di PilKaDa Landak dan KalBar 3 Agustus dan 15 November depan (Sumber: Rosadi Jamani, wartawn/anggota Redaksi Equator)

Ada dua hal menarik dalam pemilihan Bupati Sambas masa jabatan kedua yang dilaksanakan secara langsung pada 11 April 2006. **Pertama**, pemilihan itu merupakan salah satu pemilihan bupati paling bersih dan aman se Indonesia; **kedua**, pemilihan tersebut mengandung keunikan (*uniqueness*), karena ia bukan saja dimenangkan oleh Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid (BAR), tetapi kemenangan itu juga diperolehnya dengan prosentasi tertinggi se Indonesia, yaitu 72,43%, sehingga ia dan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), tercatat di dalam Musium Rekor Indonesia (MURI) untuk tingkat kabupaten. Jambi tampil sebagai pemenang pada tingkat provinsi se Indonesia dan tercatat di dalam MURI dengan angka lebih dari 80%

Resep kemenangan: Jender dan Kebijakan Tidak Populis.

Sehari setelah hasil pemilihan resmi diumumkan oleh KPUD saya mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan BAR tentang kunci kemenangannya. Ia menjelaskan dengan rasa syukur dan gaya yang tidak berubah – ramah, sangat bersahabat dan rendah hati – bahwa kemenangannya adalah berkat karunia Allah, kemauan dan kemenangan rakyat Sambas. Tapi dari pembicaraan isterinya dan beliau sendiri secara implisit, paling tidak dua faktor utama mendorong kemenangan itu, (1) berkaitan dengan isu jender, dan (2) berhubungan dengan kebijakan yang disebut mereka sebagai “tidak populer,” tapi dilaksanakan secara berani dan konsekuen.

Faktor tersebut mengantarkan Bang De -- begitu sapaan akrabnya -- duduk kembali di kursi Bupati Sambas untuk kedua kalinya, yang menurut dia, jabatan itu tidak digunakan sebagai wadah bagi kepentingan kelompok, klik (*clique*), keluarga dan dirinya sendiri, tapi merupakan amanah dari Allah dan rakyat yang harus disyukuri.

Isu Jender Murni atau Profesional

Jauh sebelum pemilihan Bupati Jabatan kedua digulirkan, banyak calon yang melamar ingin menjadi calon wakil bupati (Cawabup) untuk mendampingi sebagai calon Bupati Sambas. Sedangkan calon bupati (Cabup) pada pemilihan tersebut hanya berjumlah 3 (tiga) pasang, termasuk pasangannya, jadi jumlah Cabup tidak sebanyak jumlah yang mencalonkan diri sebagai Cawabup.

Banyaknya jumlah pelamar sebagai Cawabup membuat Bang De menjadi bahagia tetapi bingung. Ia merasa bahagia karena ada juga orang yang masih percaya untuk mendampinginya memimpin Kabupaten Sambas, dengan bersedia sakit sama sakit, susah sama susah dan senang sama senang, dalam membangun Kabupaten di ujung Utara yang ketinggalan ini. Rasa bingung ditimbulkan oleh fakta bahwa Bang De harus memilih dan memutuskan salah satu dari banyak pelamar itu sebagai wakilnya. Mengapa bingung? Karena semua pelamar calon Cawabup itu berkualitas dan memenuhi syarat, sayang kalau ada yang harus tidak diterima.

Lalu bagaimana ia sampai dapat memilih satu orang calon wakilnya yang berkualitas dari banyak pelamar yang juga berkualitas? Bupati yang menang telak ini tidak menggunakan nalar, perasaan, logika dan kemauan pribadi, hanya sedikit teori sosial tentang kepemimpinan. Akan tetapi ia menyerahkan pilihan itu hampir seluruhnya kepada Tuhan-Nya melalui shalat Istiqarah selama beberapa malam. Akhirnya ia memperoleh petunjuk untuk memilih calon pendampingnya, seorang dokter wanita. Ia heran mengapa ia memilih orang itu? Tetapi suara terngiang-ngiang jelas

menyebut nama itu berkali-kali setiap ia bersujud dan tafakur, “pilihlah dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.PH.”

Setelah memutuskan memilih nama itu, ia menyadari apa yang berkembang dalam masyarakat internasional, regional, nasional, daerah, bahkan di kabupaten yang ia pimpin bahwa isu jender telah, sedang dan akan tetap menjadi isu pokok dalam kehidupan manusia. Perempuan tidak lagi hanya menjadi insan reproduksi, berkebutuhan dengan masalah dapur dan rumah (*domestication issues*), membesarkan anak, dan “melayani” suami belaka, tetapi lebih dari itu, mereka adalah kekuatan ampuh dalam proses pembangunan dan mitra seimbang (*balanced partnership*) laki-laki dalam berbagai bidang terutama dalam kesetaraan jender.

Apakah pemilihannya tepat berdasarkan suara bergema dalam shalatnya itu? Kemudian ternyata pilihannya terbukti benar, karena ia memilih wakilnya tidak hanya berdasarkan pertimbangan sempit, jenis seks, jender murni, perempuan *ansich*. Lebih dari itu, pemilihan itu jatuh pada seorang profesional, ahli dalam dan menguasai bidangnya: kesehatan, kewanitaan, pendidikan dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, kebetulan saja ia seorang perempuan.

Sebagian terbesar rakyat Kabupaten Sambas memerlukan, sebagaimana juga Bang De pada jabatan kedua ini mendambakan, pendamping seperti itu ditengah masyarakat yang rata-rata masih dapat dikategorikan belum sangat berkembang dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, wawasan, dan sektor sosial kemasyarakatan lainnya. Ia percaya wakilnya akan mampu membantunya mengatasi masalah-masalah dalam sektor-sektor tersebut, sementara ia memfokus di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, lapangan kerja dan perguruan tinggi. Gabungan faktor jender dan profesionalisme merupakan salah satu kunci kemenangan besar pasangan ini. Bang De dan tokoh masyarakat di daerah ini faham dengan karakteristik masyarakat Sambas yang lebih berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Karenanya, mereka gandrung pada pemimpin yang mau dan mampu berjuang keras bagi kesejahteraan mereka -- walaupun melalui kebijakan yang

disebutnya “tidak populis.” Selain itu masyarakat Sambas menginginkan pendidikan putera-puteri mereka lebih bermutu dan go nasional dan internasional.

Kebijakan “Tidak Populer/Populis?,” Tetapi Tepat Arah.

Ketika berbicara tentang program kerjanya BAR menyatakan bahwa andaikata memiliki dana yang cukup, ia tidak memprioritaskan membangun *mall*, kompleks pertokoan dan pasar Swalayan yang supermegah; gedung kantor bupati, DPR, kantor-kantor pemerintahan lainnya yang supercanggih; hotel-hotel berbintang dan lapangan golf berstandar internasional, sebelum setiap desa dan kecamatan di kabupaten ini memiliki prasarana, sarana, fasilitas, peralatan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA serba lengkap, termasuk para tenaga pengajar lebih dari cukup, dan bermutu, dengan minimal standar Daerah Kalbar. Ia juga lebih memprioritaskan pembukaan lapangan kerja dalam berbagai sektor antara lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan; jasa, industri, kerajinan rakyat; dan pembangunan dan pembinaan sektor informal terpusat, prasarana dan sarana transportasi air dan darat sampai ke pelosok desa dan ke kawasan perbatasan, dan kesehatan masyarakat, ketimbang melaksanakan pembangunan fisik yang tidak menyentuh rakyat banyak.

Apa yang dimaksud dengan kebijakan “tidak populis” mengandung arti terbalik dan sebenarnya justru populis -- berkaitan dan langsung menyentuh kepentingan dasar rakyat banyak. Kebijakan dianggap “tidak populis” lebih berkaitan dengan tidak populernya kebijakan itu dimata elit politik dan lingkungan dekat pimpinan, karena dianggap tidak memperhatikan kepentingan dan menguntungkan mereka.

Seperti telah menjadi “kewajiban” pemimpin dan pertimbangan utama dalam pemilihan pemimpin dalam alam “moderen” ini, setiap kebijakan dan implementasi kebijakan yang lebih memperhatikan dan memelihara kepentingan kelompok kecil yang telah memilih dan mengatur terpilihnya sang pemimpin, seperti antara lain para oknum elit politik, mereka yang berada di dalam lingkaran dekat, afiliasi

kelompok politis dan para avonturir preman, akan dianggap “populer” atau “populis,” walaupun ada penghindaran terhadap kepentingan rakyat. Karena itulah, tidak sedikit pemimpin sekarang ini lebih terdorong untuk menciptakan para loyalis-loyalis dan menyenangkan orang-orang di lingkaran dekat mereka yang avonturir asal si pemimpin berkuasa, tanpa orientasi pada pelayanan publik, karya, produktivitas, kreativitas, etos kerja, dan standar kualitas dalam persaingan nasional, regional dan global. Padahal orientasi seperti ini cenderung menghancurkan lembaga, daerah dan negara, karena loyalitas tidak dengan sendirinya menciptakan dan meningkatkan etos kerja dan produktivitas, tetapi hal itu terjadi sebaliknya.

Inilah yang membuat bangsa ini terpuruk dan – kalau tidak mau dikatakan – bangkrut. Kondisi negatif seperti ini akan dapat diubah bilamana DPR(D) – dalam sektor pemerintahan – dan Senat Universitas – dalam dunia akademis – tidak lagi memiliki fungsi memilih pemimpin (*not longer to have function of electing leaders*) dan tidak juga lagi menjadi blukar (*broker*) politik (*political broker*). Sambas beruntung sampai sekarang anggota DPRDnya tampaknya belum berorientasi kearah itu.

Kemenangan BAR dalam pemilihan bupati bukan saja merupakan kemenangan masyarakat Sambas yang menyadari pentingnya menetapkan dan memiliki nyali dalam melaksanakan kebijakan “tidak populistis,” tetapi juga merupakan pembaharuan politik, khususnya dalam segi pemilihan dan penciptaan pemimpin (*leadership building and election*). Selamat berjuang dan sukses BAR, anda telah memulai pembaharuan di daerah ini, dan masa kedua ini, Sambas akan harus lebih baik lagi.

BAB XI

*PILKADA LANDAK DAN PROVINSI KALBAR: KEBERHASILAN, MULTIKULTURALISME DAN CLEAN GOVERNANCE*⁶

Rakyat di daerah pemilihan sangat mengharapkan keberhasilan pemilihan kepala daerah (PILKADA) dalam memilih kepala daerah (KADA) yang tepat. Hal itu merupakan keinginan sangat wajar dan sejajar (*paralel*) dengan harapan rakyat bagi keberhasilan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan harga diri mereka. Untuk itu keberhasilan PILKADA adalah juga keberhasilan seluruh rakyat di daerah pemilihan, pemimpin dan pemerintah mereka dalam menciptakan para pemimpin baru atau pemimpin priode kedua yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan hari depan mereka.

Paling tidak ada 2 (dua) faktor yang harus dimiliki oleh calon KADA yang akan tampil dalam PILKADA Kabupaten Landak 3 Agustus ini dan PILKADA KALBAR 2007, yaitu **(1) tampilnya KADA yang diinginkan rakyat, (2) partisipasi segenap lapisan atau kelompok masyarakat.** Selain itu, paling kurang ada 3 (faktor) yang akan harus dilaksanakan oleh calon KADA agar dapat memenangkan persaingan, **(a) mampu menyikapi otonomi daerah, (b) melaksanakan tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dan (c) melaksanakan pemberdayaan rakyat.**

Agustina dalam tulisan pembaca (dalam *Harian Pontianak Post*, 18 Juli 2006:21) menawarkan "PILKADA yang patut ditiru". Kalau PILKADA ingin berjaya, ikutilah cara-cara yang telah ditempuh oleh Kabupaten Sambas, kalau PILKADA tidak ingin berhasil, ikuti cara-cara dari kabupaten lain yang PILKADANYA dinilai semrawut. Ini menunjukkan bahwa

⁶ Artikel ini pernah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan *Jum'at*, 4 Agustus 2006, halaman 15.

keberhasilan PILKADA tidak harus diletakkan di depan, tetapi ia merupakan keseluruhan proses, konsekuensi dari alternatif, tindakan atau cara-cara yang akan dipilih, dan ada atau terlaksananya lima faktor di atas.

Partisipasi Rakyat.

Berhasil, aman dan – walaupun mau disebut sebagai -- harmonisnya suatu PILKADA berkaitan pula dengan kemampuan para tokoh masyarakat dan Partai politik (PARPOL) memunculkan para calon pemimpin. Kemudian rakyat memilih salah satu dari mereka sebagai calon pemimpin yang diinginkan secara cerdas berdasarkan hati nurani melalui suatu proses pesta demokrasi. Karena itu, PARPOL harus mampu melihat secara jeli, arif dan bersedia pula secara ikhlas (?) menyediakan “perahu” untuk menggusung bakal calon (BALON) yang dipandang mampu menjadi KADA yang diinginkan rakyat. Tidak banyak pemimpin berkualitas memiliki kemampuan material untuk “membeli perahu.” Oleh karena itu insan-insan PARPOL hendaknya bersedia memberi kesempatan kepada pemimpin yang demikian.

Kehadiran para KADA yang diinginkan adalah suatu proses alamiah dalam mana setiap orang di daerah pemilihan merasa mampu, memiliki dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, memiliki para pendukung yang bersedia mendukungnya karena mereka mengetahui betul kapasitas, kemampuan, dan keunggulan orang yang mereka gusung dalam proses PILKADA. Kepemimpinan seperti itu adalah kepemimpinan daerah dimasa depan, karena masa depan bangsa dan daerah ini tergantung pula pada pemimpin yang *visioner* ke depan (*future visionary*), jujur, berkualitas, memiliki **rasa malu dan dosa**, mau bekerja keras, dan berorientasi pada rakyat. Tanpa faktor ini suatu PILKADA akan hambar bahkan ia hanya sebagai sebuah permainan “wayangan” saja.

Kehadiran KADA di provinsi ini dan di daerah Landak melalui proses PILKADA seharusnya tidak saja memiliki

kemampuan menghimpun dan mempersatukan seluruh aliran, golongan dan kelompok masyarakat yang majemuk, tetapi juga dapat diterima dengan sendirinya oleh masyarakat yang beragam itu melalui partisipasi sebagian terbesar rakyat. Para calon KADA hendaknya memiliki baik kemampuan manajemen dan teknis pemerintahan maupun pengetahuan tentang manajemen konflik, selain itu para calon KADA hendaknya memiliki karakter multikultural sehingga mampu menciptakan dan meningkatkan partisipasi rakyat.

Karakter multikultural adalah kelanjutan dari karakter yang berkembang dalam masyarakat majemuk. Karakter ini berkaitan dengan pemahaman, pengertian, penerimaan, penghargaan atas perbedaan pendapat, ide, nilai budaya, bahasa, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dari orang/kelompok lain dalam kesederajatan; penghormatan, keingintahuan tentang budaya etnis orang lain; adanya toleransi untuk menerima dan menghargai pendapat dan karya orang lain kendatipun berbeda; karakter yang memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata (Suparlan, 2001; Alqadrie, 2006). Karakter multikultural secara umum dan mendasar adalah karakter yang mengakui keberadaan (*existence*) kelompok lain secara utuh – tidak hanya pada saat diperlukan pada masa kampanye, tetapi juga secara utuh, ikhlas dan berkesinambungan, mengakui peranan dan menghargai karya mereka selama ini.

Ini juga berarti bahwa ada usaha dari BALON, calon, sampai menjadi KADA terpilih untuk selalu menciptakan dan melaksanakan keseimbangan etnis (*ethnic balance*) dengan memperhatikan keberadaan, peranan dan kepentingan mereka melalui karakter multi kultural. Karakter seperti ini harus selalu dimiliki oleh para calon kepala daerah di daerah ini, kalau kita ingin membuat tidak hanya PILKADA berhasil dan aman, tetapi juga pemimpin yang berhasil. Dengan demikian mereka akan mendapatkan partisipasi penuh dari seluruh kelompok masyarakat menuju kursi KADA dan wakil kepala daerah (WAKADA), karena mereka bukan saja dapat menggalang dan akan digusung oleh sebagian besar kekuatan massa rakyat yang majemuk, tetapi partisipasi itupun akan

mereka peroleh dalam melaksanakan program pembangunan dalam rangka menyejahteraan seluruh rakyat di daerah ini.

Pemberdayaan Rakyat.

Tampilnya para calon KADA di kabupaten ini akan sangat diinginkan masyarakat yang majemuk (*plural*) kalau mereka memiliki karakter multikultural, dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya sehingga mereka mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keberhasilan seorang KADA baik dalam memenangkan PILKADA maupun dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya, kalau ia menyikapi secara arif OTDA, tata pemerintahan yang bersih, dan pemberdayaan.

Karena pada dasarnya OTDA adalah otonomi bagi seluruh rakyat di daerah, dan bukan hanya otonomi buat pemerintah daerah (Syamsudin Haris. 2001), maka pemerintah daerah yang dipimpin oleh KADA, WAKADA dan seluruh unsur eksekutif, legislatif, badan peradilan, seharusnya tidak menjalankan pemerintahan sebagai raja-raja dan pangeran-pangeran kecil yang justru hanya menuntut hak dan kebebasan dengan melakukan apa saja demi kepentingan sempit jangka pendek mereka -- “raja” dan “keluarga bangsawan dekatnya” -- dengan mengorbankan rakyat kecil. OTDA bukan otonomi untuk bagi-bagi kapling sumberdaya alam (SDA) dan harta negara dengan sesama unsur PEMDA dan pemerintah pusat (PEMPUS) dengan tidak memperhatikan fungsi dan kewajiban KADA untuk menjadikan daerah sebagai mitra Pusat dan menjadikan OTDA sebagai jembatan emas menyejahterakan rakyat.

Tiga dari 10 prinsip tata pemerintahan yang bersih, yaitu keterbukaan (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*) dan pemberdayaan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang sangat prinsip untuk dilaksanakan oleh calon KADA kalau mereka ingin berhasil baik dalam memenangkan PILKADA maupun dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang KADA hendaknya selalu terbuka terhadap fihak dalam dan fihak luar.

Prinsip keterbukaan menyangkut baik kritik, saran dan penilaian maupun dalam soal keuangan dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya. Keterbukaan berkaitan langsung dengan prinsip pertanggungjawaban yaitu kemauan dan kewajiban untuk mempertanggung jawaban setiap senpun pemasukan dan pengeluaran, transaksi serta setiap pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Keterbukaan dan pertanggungjawaban berhubungan pula dengan pemberdayaan.

Pemberdayaan meliputi pemberdayaan rakyat dan pemberdayaan hukum. Pemberdayaan rakyat didasarkan pada fakta yaitu adanya kemerosotan kapasitas rakyat dalam menangani masalah mereka sendiri. Pembangunan adalah proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional dalam memobilisasi dan menggali sumber daya untuk perbaikan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka, berkelanjutan, adil dan merata (David Korten, 1990). Karena itu pembangunan harus berpusat pada rakyat. Pemberdayaan hukum berhubungan timbal balik dengan pemberdayaan rakyat yaitu perlunya penegakan hukum yang tidak berfihak pada segelintir orang mempunya dengan mengorbankan sebagian terbesar rakyat yang tidak berdaya.

Oleh karena itu calon KADA di Provinsi Kalbar dan Landak yang diinginkan hendaknya memiliki dan melaksanakan karakter multikultural yang mampu meningkatkan partisipasi seluruh kelompok, dan bersedia, mampu dan berani melaksanakan secara konsekuen 3 (tiga) prinsip tata-tata pemerintahan yang bersih – keterbukaan, pertanggung jawaban, dan pemberdayaan.

BAB XII

*SEJARAH BARU DALAM PILWAKO DI SINGKAWANG: "BEBAN" PSIKOLOGIS(?)*⁷

A. BAGIAN 1.

Ini walikota baru, ini "baru" walikota (WaKo)! Singkawang mungkin memiliki WaKo dan wakil walikota (WaWaKo) baru? Pasangan no. 3 Hasan Karman (HK) dan Edy Yacoub (EY), sampai dengan 22/11-2007 (Ptk. Post, 23/11-07b:1) unggul dengan perolehan suara 41,8% (Ptk. Post, 23/11-2007b:1). Pasangan *incumbent* no. 5, Awang Ishak (AI) - Raymundus Sailan (RS) membuntuti ketat dengan jumlah suara 35,6% (Ptk. Post, 23/11-2007b:1). Banyak pengamat minilai HK dan EY tampaknya bakal menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Singkawang.

Saya tidak bermaksud mendahului pengumuman resmi dari KPUD dan sumber resmi yang berwewenang lainnya di Singkawang maupun di Pontianak, tidak juga bermaksud mempengaruhi opini masyarakat pemilih di Singkawang, atau mengenyampingkan pejabat berwewenang yang akan melantik secara resmi WaKo dan Wakilnya nanti. Tulisan ini hanya ingin mengemukakan beberapa hal menarik dari hasil sementara Pemilihan Walikota (PilWako) ini, khususnya apa yang mendorong kemenangan pasangan ini dan kemungkinan adanya "beban" psikologis terhadap salah satu pasangan tersebut seandainya mereka ditetapkan sebagai WaKo baru Singkawang.

Sejarah Baru.

⁷ Artikel ini yang merupakan prediksi pemenang pemilihan walikota (PilWaKo) Singkawang 15 November 2007 dimuat dalam 4 (empat) kali terbitan. Tulisan pertama dari empat terbitan dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Umum Equator* terbitan Selasa 27 November 2007, hal. 10. Gabungan dari empat terbitan ini dalam bentuk yang sedikit lebih ringkas dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Umum Pontianak Post* terbitan Minggu, 25 November 2007, halaman 15.

Seandainya perbandingan perolehan suara tidak berubah secara signifikan, fenomena menarik dalam proses PilWako ini ialah bahwa pasangan HK dan EY akan mengukir sejarah baru di bidang politik, khususnya di sektor pemerintahan dan PilKaDa di Indonesia pada umumnya, di KalBar dan Kota Singkawang khususnya. Mengapa Sejarah? Sebagai seorang Indonesia keturunan Tionghoa (*"Chinese descendant Indonesian"*) [di Kalbar istilah Tionghoa sudah lebih umum digunakan daripada istilah Cina], HK telah mengukir sejarah sebagai WaKo pertama berasal dari anggota kelompok etnis tersebut. Mengapa sejarah baru? Pasangan no. 3 ini ternyata merupakan pasangan campuran pertama antara anggota kelompok etnis Tionghoa dengan anggota kelompok etnis Melayu yang akan menjadi pimpinan Lembaga Eksekutif pertama di Indonesia pada umumnya, di KalBar dan di Singkawang pada khususnya.

Kemenangan dan Etnisitas.

Kalau pasangan HK dan EY mungkin akan mengukir sejarah baru di KalBar lewat PilWaKo ini, pertanyaan yang timbul adalah mengapa itu dapat terjadi? Itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Pemenang PilKaDa langsung dari rakyat, siapapun, dari kelompok etnis manapun, dan dari asal keturunan apapun dia, harus diterima dengan hati terbuka dan lapang dada. Dalam negara demokratis, kepala pemerintahannya, termasuk kepala-kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di negara tersebut yang menganut pemilihan langsung, adalah pimpinan yang dibentuk atau dimenangkan secara demokratis oleh mayoritas penduduk dari segi jumlah (paling sedikit 50,01% dari seluruh jumlah pemilih).

Melihat penduduk Singkawang yang mayoritasnya keturunan Tionghoa berjumlah 48%, berdasarkan perhitungan di atas kertas, HK dan EY sebenarnya bisa saja memperoleh kemenangan lebih besar daripada 41,8%, bahkan mungkin lebih dari 48%, apalagi adanya pemilih gabungan berasal dari keturunan Tionghoa, Melayu dan kelompok etnis lain.

SEJARAH BARU DALAM PILWAKO DI SINGKAWANG: "BEBAN" PSIKOLOGIS(?)⁸

B. BAGIAN 2

Fenomena ini menunjukkan bahwa –suka/tidak, setuju/tidak -- faktor etnisitas masih berperan penting dalam memenangkan pasangan calon. Tidak bermaksud mengurangi peranan EY terhadap kemenangan pasangan ini yang didukung oleh simpatisannya dari orang-orang Melayu dan kelompok etnis lain, tetapi sumbangan suara mereka tampaknya tidak signifikan, karena suara ini pecah kepada 5 pasangan yang notabene 4 CaWaKo adalah Melayu. Karenanya, sumbangan yang sangat signifikan atas kemenangan pasangan nomor 3 ini diperkirakan berasal dari suara orang-orang Singkawang keturunan Tionghoa yang lebih fokus/tidak pecah sebagaimana itu terjadi pada para pemilih Melayu.

Adalah benar bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) CaWaWaKo berasal dari keturunan Tionghoa. Hanya satu pasang calon bukan berasal dari anggota kelompok etnis ini, yaitu pasangan no. 5 (Melayu-Dayak). Ini menunjukkan bahwa jumlah suara yang diperoleh pasangan calon no. 1, 2, 3, 4, adalah gabungan suara dari para anggota dari berbagai kelompok etnis, termasuk keturunan Tionghoa. Jadi kalaulah ketiga pasangan calon no. 1 Suyadi (S) dan Bong Wui Khong (BWK), no. 2 Syafei Djamil (SD) dan Felix Priyadi (FP), dan no. 4 Darmawan (D) dan Ignatius Apui (IA) memperoleh masing-masing suara 3,5 %; 3,02%; 15,9% (Ptk. Post, 23/11-2007:1), itulah kenyataannya bahwa jumlah suara ketiga pasangan calon tersebut diperoleh dari pecahan dan sisa-sisa suara pemilih dari berbagai kelompok etnis di kota ini: Tionghoa, Melayu, Madura, Jawa, Bugis, Dayak, Banjar dan sebagainya. Pecahan atau sisa-sisa suara pemilih dimaksud antara lain

⁸ Artikel ini yang merupakan prediksi pemenang Pemilihan Walikota (PilWaKo) Singkawang 15 November 2007 dimuat dalam 4 (empat) kali terbitan. Tulisan kedua dari empat terbitan dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Umum Equator* terbitan Rabu 28 November 2007, hal. 10.

adalah bahwa tidak ada kosentrasi (*cocentrati*on) suara dari kelompok-kelompok etnis di Singkawang untuk memilih salah satu dari ketiga pasangan calon di atas.

Kosentrasi suara pemilih mungkin secara penuh ditujukan hanya pada pasangan calon no. 3 dan no 5 yaitu kelompok etnis Tionghoa terkonsentrasi pada pasangan calon HK dan EY, dan kelompok etnis Melayu dan Dayak terpusat pada pasangan AI = Melayu, RS = Dayak (Tetapi jangan lupa suara Melayu telah terbagai atas tiga pasangan tersebut di atas). Asumsi saya berdasarkan fakta adalah bahwa Indonesia pada umumnya (bahkan di negara Barat pun – kasus-kasus Basque di Prancis dan Spanyol; Irlandia Utara; Flemmings di Denmark; Quebec di Canada, dsbnya), dan KalBar serta Singkawang pada khususnya, masih mengalami transisi dalam hal keberminatan terhadap siapa yang akan dipilih. Kalau ada kesempatan memilih langsung, sebagian besar pemilih akan memilih calon dari kelompok etnisnya dan agama mereka sendiri.

SEJARAH BARU DALAM PILWAKO DI SINGKAWANG: "BEBAN" PSIKOLOGIS(?)⁹

C. BAGIAN 3

Kebangkitan atau Kesadaran Etnis.

Mengapa kelompok etnis Tionghoa yang selama ini kurang peduli dengan politik, lebih fokus pada dunia bisnis, sabar dalam menghadapi realitas keseharian dan konstelasi bisnis berkaitan dengan keamanan jalur usaha dalam berurusan dengan birokrasi dan politik, tiba-tiba menjadi "peduli," berpartisipasi dan mampu memfokuskan diri pada pilihan terhadap seseorang yang mampu menampilkan beradaan kelompok mereka dalam politik? Paling tidak ada dua perspektif yang dapat menjelaskan fenomena di atas, yaitu kebangkitan etnis dan kesadaran etnis.

Kebangkitan etnis mengandung konotasi adanya unsur reformasi, bahkan "revolusi" yang diperlambat, dengan membentuk kembali tatanan baru dan membongkar segala sesuatu yang lama. HK dan EY tentu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, tapi justru akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka, AI dan RS. Apa yang telah berhasil dilanjutkan dan dipertahankan, sebaliknya program yang belum ada atau kurang tepat, akan diadakan dan diperbaiki. Lagipula, sebagian besar penduduk Singkawang 'keturunan' Tionghoa (Istilah 'keturunan' berkaitan dengan istilah teknis untuk menunjuk pada suku atau sub kelompok etnis mana seseorang berasal, misalnya Dayak, Melayu, Madura dll. Akan tetapi adalah kurang tepat untuk mengatakan orang-orang Tionghoa Kalbar, khususnya Singkawang, sebagai anggota kelompok etnis Cina (*Chinese ethnic group*). Mereka tidak juga dapat dikatakan secara etnis sebagai suku di Indonesia, tetapi lebih tepat disebut 'orang-

⁹ Artikel ini yang merupakan prediksi pemenang Pemilihan Walikota (PilWaKo) Singkawang 15 November 2007 dimuat dalam 4 (empat) kali terbitan. Tulisan ketiga dari empat terbitan dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Umum Equator* terbitan Kamis 29 November 2007, hal. 10.

orang Indonesia/KalBar/Singkawang keturunan Tinghoa”, berkat kerja keras dan keuletan mereka, telah mengalami perbaikan tingkat sosial ekonomi dari kelas bawah ke menengah ke atas (walaupun masih banyak diantara mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan). Kedudukan sosial ekonomi ini dicapai melalui proses panjang 1 - 2 generasi yang diperkuat oleh dan memperkuat apa yang disebut dengan kebangkitan kelompok. Jadi, kebangkitan etnis lebih berkaitan dengan proses perbaikan status sosial ekonomi.

Kesadaran etnis mengandung dua pengertian: kesadaran dari dalam (*internal ethnic consciousness*), dan kesadaran dari luar (*external ethnic consciousness*). Kesadaran pertama cenderung mengandung hal positif dan timbul dari kesadaran mendasar bahwa suatu kelompok etnis sudah ada melalui proses alamiah dan sosial. Karenanya, para anggotanya mengakui dan menghargai kelompok lain sebaliknya keberadaan mereka seharusnya juga diakui dan dihargai. Kesadaran etnis kedua timbul setelah suatu kelompok etnis hidup berdampingan dengan kelompok lain yang menimbulkan keinginan agar kelompok mereka seharusnya sama derajatnya dengan kelompok lain yang sebelumnya mereka anggap berbeda. Kesadaran ini cenderung menjadi negatif manakalah keinginan untuk sama dengan atau lebih dari kelompok lain dilakukan dengan segala cara yang melanggar hukum, sebaliknya ia menjadi positif, ketika keinginan untuk sama dengan atau lebih dari kelompok lain dilakukan dengan kompetisi adil dan tidak melanggar hukum.

Membandingkan kebangkitan dengan kesadaran etnis, kemenangan mayoritas penduduk Singkawang keturunan Tionghoa dalam PilWaKo 15 November 2007 yang diwakili oleh HK tampaknya cenderung didorong oleh dua kesadaran etnis --dari dalam dan dari luar yang positif, yang mereka lakukan melalui proses persiapan dan persaingan yang cukup panjang. Kesadaran seperti ini mendorong mereka untuk memiliki posisi yang sama dalam bidang sosial politik dengan kelompok lain. Akan tetapi, kesadaran etnis, yang memotivasi mereka untuk memiliki kedudukan yang sama dengan kelompok lain dalam bidang sosial politik tanpa melalui

tahap-tahap dalam proses politik, tidak luput menimbulkan "beban"/"himpitan" psikologis. "Beban" itu cenderung bertambah, seandainya kelompok enis ini melalui HK dan EY menggunakan kesadaran etnis ini tidak melalui cara-cara yang demokratis dan profesional.

*SEJARAH BARU DALAM PILWAKO DI SINGKAWANG: "BEBAN" PSIKOLOGIS(?)*¹⁰

D. BAGIAN 4

"Beban" Psikologis?

Beberapa tokoh Tionghoa Singkawang dan Pontianak tampaknya memahami apa yang disebut "beban psikologis" dari tampilnya seorang putera Indonesia kelahiran Singkawang keturunan Tionghoa menjadi WaKo. Berdasarkan pertimbangan ini, saya pernah menyarankan di *Equator* (4-5/9-2007:10) perlunya masa transisi 5 tahun bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan menjadi WaWaKo terlebih dahulu sebelum menjadi WaKo.

"Beban" psikologis ini menyangkut beberapa unsur yaitu HK: (1) adalah orang pertama menjadi WaKo di Indonesia; (2) akan menjadi kepala Eksekutif dari sebuah pemerintahan kota, padahal ia berasal dari dunia bisnis. Biasanya kebanyakan mereka yang menjadi kepala Eksekutif di daerah ini berasal dari pejabat pemerintah; (3) akan membawahi para staf yang bukan dari dunia bisnis dan yang justru berasal dari berbagai kelompok etnis dan golongan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda; (4) Memimpin di dunia bisnis tentu tidak sama dengan memimpin di dunia birokrasi. Karena itu HK seharusnya

¹⁰ Artikel ini yang merupakan prediksi pemenang Pemilihan Walikota (PilWaKo) Singkawang 15 November 2007 dimuat dalam 4 (empat) kali terbitan. Tulisan keempat dari empat terbitan dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Umum Equator* terbitan Jumat 30 November 2007, hal. 10.

perlu belajar banyak tidak saja dari bawahannya yang telah berpengalaman di sektor pemerintahan, tetapi juga dari masyarakat dalam memahami masalah sosial.

Beban psikologis seperti ini akan dialami oleh masyarakat, para pegawai, staf dan para pejabat di Sekretariat Pemerintahan Kota Singkawang, bahkan mungkin pula oleh Wakilnya. Betapa tidak? Penggantian kepala eksekutif yang menoreh sejarah baru di kota ini memerlukan penyesuaian, pendekatan, dan strategi baru baik dalam sektor pemerintahan, hubungan dan kordinasi formal atau keumasan, dan dalam menyatukan dua perspektif—dunia usaha, dan dunia politik pemerintahan, maupun di bidang sosial kemasyarakatan dan budaya, yang sering menjauh dan kadang berbenturan. Akan tetapi demokrasi mengajarkan kita tentang prinsip bahwa setiap orang adalah sama, dan untuk itu kita perlu belajar dan menghargai satu dengan lain.

Akan tetapi, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di kota ini, HK dan EY tentu telah memahami betul nilai-nilai sosial budaya dan karakteristik masyarakat Singkawang. Mereka akan dapat mengatasi "beban" tersebut paling tidak setahun dalam kepemimpinan mereka. Sebagai figur masyarakat yang telah berpengalaman dalam dunia pelayanan –bisnis dan pendidikan-- mereka juga tentu memahami teori pilihan publik (*public choice theory*) dan teori Liberal tentang kekuasaan. Teori pertama mempelajari penyatuan antara pendekatan ekonomi dengan substansi politik/birokrasi atau penerapan metode ekonomi dalam dunia birokrasi, dan sebaliknya (Rachbini, 2002: 33-115). Teori kedua memperkuat kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi (Duverger, 2000:157-162).

Penerapan teori pilihan publik bertujuan meningkatkan pelayanan publik dengan memperlakukan semua golongan dan kelompok masyarakat yang berurusan dengan birokrasi/aparat pemerintah sebagai langganan dalam dunia bisnis yang harus dilayani secara prima. Perlakuan seperti ini bertujuan meningkatkan keuntungan sosial psikologis yang berupa menghilangkan keengganan masyarakat berurusan dengan para birokrat dalam upaya menggalakkan atau meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Di

dalam dunia bisnis, perlakuan ini dikenal dengan penciptaan dan peningkatan pasar atau omzet yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang dengan menjadikan masyarakat sebagai langganan yang perlu diperlakukan dengan 'prioritas utama' atau sebagai "raja." Perlakuan ini mesti ditrapkan dalam birokrasi pemerintahan.

Sebaliknya "beban" psikologis ini akan dengan sendirinya berkurang, sekiranya kedua pasangan no. 3 ini tidak menerapkan teori Liberal dalam kepemimpinan mereka. Penganut teori Liberal mengartikan perjuangan politik identik dengan persaingan ekonomi, dan keduanya merupakan dua wajah dalam mata uang yang sama (*political struggle and economic competition are two faces of the same coin*) (Maurice Duverger, 2000:157-162). Teori ini masih diterapkan oleh banyak pemimpin diberbagai negara, sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Duverger (2000:162) melihat semakin kuatnya kekuasaan politik seseorang, semakin besar pula bagian dan semakin kuat pula seseorang dalam kekayaan ekonominya, dan sebaliknya. Semoga itu tidak terjadi di Singkawang.

BAB XVII

PILBUP SINTANG 2010: TANTANGAN BAGI KEKHASAN KAWASAN PEDALAMAN JAUH¹¹

Sampai dengan dugaan "kecurangan" yang melangsir sebagai "persengketaan" pemilihan kepala daerah (PilKaDa) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), PilBup Kabupaten Sintang (Kab.S) 2010 masih terkendali, dan keadaan di kabupaten ini khususnya di Kota Sintang (KS) masih lancar/berguna (*condusive*). Namun, setelah keputusan MK diumumkan pada mana beberapa kecamatan dan desa-desa tertentu di

¹¹ Artikel ini dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Senin, 5 Juli 2010, pada Ruang Opini, halaman 5.

Kab.S diwajibkan mengulang kembali pemilihan (Ptk Post, 26/6-2010:1; Equator, 26/6-2010:1), kondisi tenang di kabupaten ini mulai terganggu.

Kawasan Pedalaman Jauh dan Pedalaman Dekat

Sebagai konsekuensinya, reputasi Kab. S sebagai salah satu daerah dalam kawasan pedalaman jauh/KPJ (*interior upland areas/IUA*) yang lebih aman, kondusif, jauh dari intrik, provokasi dan kekerasan, dianggap telah menurun. Daerah-daerah termasuk dalam KPJ/IUA adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, sebagian Sanggau, khususnya bagian Timur, Kayong Utara dan Ketapang.

Gejala ketidakamanan di Kab. S diperlihatkan oleh tiga media massa. Peristiwa gangguan terhadap ketertiban masyarakat berbentuk aksi liar dan pemaksaan: masuk ke rumah dinas pejabat, menciptakan ketakutan masyarakat, mengadakan pengelompokan secara komunal, melakukan sesuatu di depan publik yang tidak dapat diterima oleh penganut agama tertentu (Ptk Post, 26-27/6-2010:1; Equator, 26-27/6-2010:1; Borneo Tribun, 26/6-2010:1). Berita paling belakangan: Massa Pro MJ Blokir Jalan (Equator, 4/7-2010:1). Tindakan tersebut sangat mengkhawatirkan dan melahirkan pro-kontra.

Sejumlah tokoh masyarakat Sintang dari berbagai kelompok etnis dan netral dalam PilBup mengkhawatirkan tindakan negatif tersebut akan menimbulkan konflik kekerasan. Namun saya kurang sependapat dengan kekhawatiran tersebut karena masyarakat Sintang dikenal sebagai cinta damai, berkarakter lembut dan tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Lagipula, tidak ada catatan sejarah yang mengungkapkan pertikaian berarti antar kelompok etnis sebagaimana pernah terjadi di daerah-daerah lain dalam kawasan pedalaman dekat /KPD (*interior valley areas/IVA*) pada 1960-an dan 1990-an. Kawasan ini meliputi kabupaten Landak, sebagian Sanggau, khususnya bagian Barat, sebagian Kabupaten Pontianak, khususnya bagian Timurnya pada kawasan pedalaman, Bengkayang, dan Sambas.

Dua Pertanyaan Memprihatinkan

Kepedulian para tokoh masyarakat tersebut sangat beralasan dan dapat difahami. Kekhawatiran ini didasarkan pada 2 pertanyaan dan keprihatinan sekaligus. Pertama, ada apa dengan masyarakat Sintang sehingga terjadi hal-hal yang tampaknya berkaitan dengan politik etnis, mobilisasi etnis dan sejenisnya dalam dua minggu terakhir ini? Kedua, sudah berubahkah sikap, sifat dan perilaku masyarakat Kab. S sekarang ini dari

pola umum yang semula berkaitan secara budaya dan kesejarahan (*culturally and historically general pattern of attitudes, characteristics and behaviors*) sebagai kawasan yang secara geografis berada di KPJ/IUA ke pola umum yang dicirikan oleh masyarakat yang tinggal di KPD/IVA?

Jawaban atas pertanyaan pertama menunjukkan bahwa faktor kepentingan ekonomi-politik jangka pendek berkaitan dengan kekuasaan politik dari tampilnya kekuasaan lewat PilBup tampaknya sangat dominan. Ketidakpuasan sekelompok elit politik dan tokoh masyarakat terhadap Keputusan MK, tampaknya memicu terjadinya gerakan liar. Namun, segelintir tokoh masyarakat dan elit politik dari berbagai kelompok etnis di Kab. S yang mencantolkan diri mereka dengan proses PilBup, tampaknya tidak peduli dengan pentingnya kondisi aman dan kondusif yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat kabupaten ini sebagai bagian dari KPJ/IUA. Saya tidak berkomentar terhadap jawaban di atas, tapi ia menambah pengetahuan saya tentang masyarakat di kawasan unik ini.

Saya juga kurang sependapat dengan jawaban atas pertanyaan kedua tentang perubahan sikap, sifat dan perilaku masyarakat Kab.S dalam KPJ/IUA dari pola umum yang semulanya lembut, tidak “bringas” dan cinta damai kearah sebaliknya. Ini dapat dilihat dari sikap dan tindakan sopan, tertib (*elegant*) dan menghindari kekerasan yang dipertunjukkan oleh sejumlah tokoh dari dua kelompok etnis, Dayak dan Melayu, beserta massa mereka di KS dalam menanggapi aksi liar dan provokatif dari kelompok tertentu antara 24-25 Juni lalu.

Karakter Belum Berubah

Aksi damai dan tindakan *ilegant* balasan oleh sekelompok masyarakat di KS (“Kembalikan Semangat, Tim JK Gelar Ritual Adat,” dalam *Equator*, 28 Juni 2010:1; “Rumah WaBup Sintang Ditolak Bala,” dalam *Ptk Post*, 28/6-2010:36) merupakan bukti bahwa pola umum karakter dan perilaku masyarakat Kab. S sebagai KPJ/IUA yang cinta damai dan tidak “bringas” belum berubah. Perilaku semacam itu juga merupakan perwujudan dari kematangan moral, etika dan intelektual para tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah dan elit politik di kabupaten ini yang tidak memanfaatkan situasi dengan “memancing ikan di air keruh.” Selain itu, terkontrolnya kondisi panas di Kab. S

hendaknya diikuti pula oleh tindakan tegas kepolisian yang segera mengusut para aktor aksi dan provokator lainnya (Ptk Post, 28/6-2010:17; Equator, 28/6-2010:1).

Sebagai konsekuensi dari karakter dan perilaku positif seperti itu, masyarakat dari berbagai kelompok etnis secara keseluruhan bersama dengan para tokoh masyarakat di kabupaten ini boleh bangga karena mereka tetap memiliki daya tahan alamiah yang masih berada dalam pola umum karakter kejiwaan masyarakat (*general pattern of psychological characters*) dalam koridor KPJ (IUA). Karena itu, saya optimis bahwa keamanan, ketertiban dan kerukunan antar kelompok masyarakat di Kab. S akan segera pulih kembali setelah PilBup selesai.

Faktor Penyebab

Mengapa berbagai kelompok masyarakat dalam KPJ/IUP seperti Kab. S berkarakter dan berperilaku damai, lembut, menghargai perbedaan, anti-kekerasan dan tidak etnosentris? Karena: (1) Karakter psiko-sosiologis masyarakat di kabupaten ini dipengaruhi secara alamiah, ekologis dan budaya oleh letak geografisnya berada dalam KPJ/IUA. Kawasan perhuluan ini telah membentuk kejiwaan masyarakatnya bersikap kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bersama (*collective interests*) daripada individu dan kelompok sendiri. (2) Pengaruh ajaran Islam, Kesultanan Islam dan feodalisme memasuki sendi-sendi kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Ajaran Islam sangat menekankan hubungan kepatuhan antara Pencipta dengan umat-NYA (Hablumminallah) dan pada hubungan serasi antar umat (Hablumminannas). Kesultanan dan feodalisme lebih mementingkan keteraturan dan ketertiban berdasarkan norma adat, sosial dan hukum dilengkapi dengan prosesi atau tata cara resmi berdasarkan prosedur negara/istana dan upacara adat formal. Penekanannya justru bukan semata pada sanksi adatnya (*customary punishment*), tetapi lebih pada pembinaan watak, saling memaafkan antara manusia dalam upaya membangun kembali tali silaturahmi antar manusia. (3) Identifikasi etnis (*ethnic identification*) masyarakat dalam KPJ/IUA lebih berorientasi pada sub kelompok etnis pada masyarakat Melayu seperti Melayu Sintang, Melayu Tempunak, Melayu Merakai dan sebagainya, dan pada masyarakat Dayak seperti Iban, Kayan, Ot-Danum, Pompang dan lain-lain. Identifikasi keagamaan (*religious identification*) pada masyarakat Dayak juga lebih berorientasi pada berbagai agama, bukan pada satu kelompok agama tertentu, sehingga orang-orang Dayak yang beragama

Islam tetap diterima sebagai anggota sub kelompok etnis Dayak. Identifikasi etnis dan keagamaan seperti ini pada sub kelompok etnis Dayak sama persis dengan yang terjadi ditiga provinsi lainnya di Kalimantan. (4) Tidak berlakunya media identifikasi pada kelompok etnis pada mana anggota kelompok non-Melayu, seperti berbagai sub kelompok etnis Dayak yang memeluk agama Islam di KPJ/IUA tidak dianggap sebagai Melayu, tetapi tetap sebagai anggota sub kelompok etnis Dayak atau lebih disebut Senganan. (5) Sub Kelompok etnis Dayak dan Melayu di KPJ/IUA mengalami kesadaran etnis baik dari dalam (*internal ethnic consciousness*) maupun dari luar yang bersifat positif (*positively external ethnic consciousness*). Kalau kesadaran dari dalam saling menghargai dan meningkatkan marwah kelompok lain, pada kesadaran dari luar yang bersifat positif, mereka ingin mencapai apa yang dicapai oleh kelompok lain melalui proses yang benar, tidak dengan melalui segala cara dan kekerasan.

Lima faktor di atas membentuk pola umum karakter, sikap dan perilaku khas pada masyarakat Kab. S sebagai bagian dari KPJ/IUA. Ini menyebabkan kabupaten ini cenderung terhindar dari kekerasan etnis. Saya percaya, PilBup Kab. S akan sukses dan tidak menimbulkan hal yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Semoga.

BAB XVIII

PILBUP KETAPANG 2010: KARAKTER KHAS MASYARAKAT DAN TRANSFORMASI KONFLIK¹²

Pemilihan Bupati (PilBup) Kabupaten Ketapang (KK) 2010 yang dilaksanakan dua putaran selesailah sudah. Proses akhir PilBup putaran kedua ini diselesaikan dengan penetapan KPU tentang pemenang PilBup KK melalui rapat pleno 12 Juli 2010. Rapat tersebut mengumumkan hasil akhir PilBup pada mana pasangan Henrikus – Boyman Harun (HENBOY) unggul atas pasangan Yasyir Anshari – Martin Rantan (YASMAR) dengan suara 116,079 (55,24%) dan 94,052 (44,76%).

¹² Artikel ini dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Selasa, 20 Juli 2010, pada Ruang Pro-Kalbar, halaman 25.

Sebagai masyarakat demokratis dan multikultural, kita mengucapkan selamat kepada pasangan HENBOY atas “kemenangan” mereka, tanpa menyoraki dan lupa diri, serta pasangan YASMAR yang walau “kalah,” tidak menjadi “kalap’ dan “menggerakkan” massa lalu bakar gedung seperti terjadi ditempat lain. Apa yang sangat bermakna pada hasil pleno KPU 12/7 lalu adalah kita tidak hanya harus mengucapkan selamat tetapi juga bangga kepada kedua pasangan tersebut atas upaya keras mereka bertanding dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali dengan damai dan menjaga KK tetap kondusif.

Kemenangan Rakyat vs Etnosentrisme

PilBup 2010 merupakan PilKaDa pertama kali secara langsung dari dan oleh rakyat di KK. Siapapun pemenangnya adalah kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat kali ini menjadi lebih berarti karena kedua pasangan ini mampu menepis kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya konflik social (Ptk Post, 1 Juli 2010:35) dan pertikaian kelompok (Equator, 3/7-2010:1-7) yang berkembang dari isu SARA yang membahayakan persatuan (Ptk Post, 30/6-2010:33), orientasi pada primordialisme, dan afiliasi politik emosional dilandasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dan politik kepartaian sempit berbaur dengan etnosentrisme. Kedua pasangan itu juga mampu menetralsir intervensi dari luar.

Kombinasi geografis: Karakter khas

Seperti halnya Kabupaten Sintang (KS) [lihat Equator, 13/7-2010:2; Ptk Post, 5/7-2010:1; Borneo Tribun, 6/7-2010:1], ditinjau dari segi geografis, KK bagian Timur Laut, khususnya kawasan pedalaman berbatasan langsung dengan KalTeng, merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan pedalaman jauh. Sebagian lagi, kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan pedalaman dekat yang tidak terpisahkan dari kawasan pantai. Dengan demikian, KK merupakan kombinasi dari tiga kawasan geografis berbeda. Itulah sebabnya KK disebut juga kawasan transisi geografis. Berdasarkan teori hubungan geografis dan budaya (Ruthenberg, 1980) kawasan percampuran secara geografis yang menjadi kawasan gabungan tiga kriteria geografis cenderung mempengaruhi karakter budaya masyarakat yang khas dan unik berbeda dari karakter umum masyarakat di kawasan pedalaman dekat (Alqadrie, dalam Ptk Post, 5/7-2010:1 dan Equator, 13/7-2010:2).

Karakter khas masyarakat KK merupakan hasil dari kombinasi serasi antara tiga karakter umum yang dibentuk oleh tiga kawasan geografis: kawasan pedalaman jauh (perhuluan), kawasan pantai, dan – yang sekaligus merangkul -- pedalaman dekat. Kombinasi ketiga geografis ini cenderung menghasilkan karakter budaya khas masyarakat KK: lembut/fleksibel, damai, bersahabat, persaudaraan, menghargai perbedaan (*multicultural*), menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan sebagainya. Karakter budaya khas seperti ini, dalam mana dinasti kehabiban juga masih berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang, tampaknya terdapat juga di kabupaten lainnya dalam kawasan pedalaman jauh KalBar.

Kekuatan Antisipatif dan Menolak

Karakter individu dan kelompok masyarakat di KK yang terletak dalam 3 kawasan geografis tampaknya telah mendorong masyarakat KK berhasil menyelesaikan putaran akhir PilBupnya dengan lancar, sukses, aman dan damai tanpa adanya pertikaian kelompok. Selain itu, karakter bersahabat yang dimiliki masyarakat KK selama ini dipandang sebagai kekuatan antisipatif dan menolak terhadap kemungkinan timbulnya tindakan merusak kerukunan masyarakat yang ada selama ini yang sering terjadi ditempat lain. Bukti konkrit dari kekuatan social budaya semacam itu diperlihatkan baik oleh masyarakat adat Dayak dan Melayu di KK melalui ritual tolak bala dan doa bersama di Tugu Perdamaian (Ptk Post, 29/6-2010:29) maupun oleh gabungan OrMas yang melakukan gerakan damai dan *long march* agar SARA tidak dimunculkan dalam PilBup (Ptk Post,30/6-2010:29).

Sebagaimana halnya kondisi kondusif di KS dan kabupaten lain dalam kawasan pedalaman jauh (seperti Sanggau sebelah Timur, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu) sebelum dan setelah PilBup, masyarakat KK sangat mengharapkan agar tradisi dan karakter damai, bersahabat dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan yang telah lama ada, perlu dipertahankan.

PilBup dan Intervensi: Biduk Lalu Kiambang Bertaut.

Hasil pengamatan saya ketika PilBup tahap dua berlangsung mengungkapkan bahwa Melayu dan Dayak adalah bersaudara: abang/kakak dan adik. Sebagian terbesar tokoh masyarakat dari berbagai kelompok di KK melihat PilBup tak lebih dari semacam “biduk” yang akan membawa masyarakat ke kondisi lebih baik. “Janganlah “biduk” ini

membuat kami bersaudar terpecahbelah. Biarlah “biduk” itu berlalu dan kiambang akan bertaut kembali.”

Keprihatinan itu mengungkapkan tidak hanya tingginya nilai persaudaraan antar kelompok di KK, khususnya antara Melayu dan Dayak, tapi juga bermakna bahwa ikatan persaudaraan antar mereka tidak dapat dirusak oleh PilBup sebagai “biduk” maupun oleh intervensi luar. Ini terbukti bahwa dalam belasan kali pertikaian 1960-an-1990-an di KalBar, Ketapang selalu aman.

Keterlibatan luar dianggap sebagai aliansi partai padahal ia merupakan intervensi politik primordial diperkuat oleh jaringan birokratis yang sangat tidak pantas dilakukan di daerah otonom dalam negara demokratis, (Ptk Post, 25/6-1020:1-7). Keterlibatan itu juga berbentuk kehadiran sebagai orang “dalam” (Equator, 28/6-2010:1-7) padahal ada maksud tersembunyi di dalamnya sebagai “perselingkuhan” antara pengusaha dan penguasa dalam arena ekonomi politik untuk kepentingan ekonomi sempit jangka pendek. Padahal seharusnya ada kenetralan dan menjadi pembina bagi semua pasangan PilBup.

Femomena seperti ini yang terjadi juga dalam PilBup di KS, dianggap oleh sebagian besar tokoh berbagai kelompok etnis di KK sebagai sangat **provokatif** dan **biang utama** pemecah belah hubungan etnis. Namun, karakter masyarakat di KK sejak dulu: lembut, bersahabat dan damai, yang memperkuat karakter kedua pasangan itu, YASMAR dan HENBOY, sehingga mampu berfikir positif bagi kepentingan KK, ternyata mampu menetralsir intervensi itu. Kematangan kedua pasangan ini dan para pengikut masing-masing dalam mencegah pertikaian kelompok, terbukti ketika mereka berhadapan dengan isu “pertarungan” OrDe Baru dengan OrDe Reformasi (Equator, 24/6-2010:1). Isu provokatif, yang merupakan gambaran ketidaknetralan, dan ketidaklayakan dilakukan, dianggap oleh kebanyakan tokoh kelompok etnis Dayak dan Melayu sebagai “kompur gas elpiji 3 kg yang bocor” tapi siap membunuh hanguskan kabupaten yang damai ini. Provokasi ini tidak lain adalah upaya mentransformasikan PilBup damai menjadi kompetisi politik primordial yang amat berbahaya.

Kalaupun ada gejolak kecil pada saat dan setelah PilBup berlangsung, seperti pengerahan massa sebanyak 7 truk dari luar kota, unjuk rasa damai menolak hasil pleno KPU, anggapan bahwa putusan KPU belum final (Ptk Post, 15/7-2010:25), dan

YASMAR daftarkan gugatan ke MK (Ptk Post, 16/6-2010:25), merupakan riak-riak kecil di dalam laut PilKaDa yang bahkan lebih hebat terjadi juga di daerah lain yang masyarakatnya sedang belajar berdemokrasi. Demikian pula pemecatan terhadap ketua DPR KK dan beberapa anggota partai tertentu yang dianggap tidak loyal kepada partai (Ptk Post, 14/7-2010:25), GK dulang simpati (Ptk Post, 15/6-2010:25) dan Gelar adat Melayu ME dihapuskan oleh pemangku adat kesultanan M (Equator, 17/7-2010:1), merupakan bentuk transformasi konflik dari kemungkinan konflik komunal yang lebih besar: dua kelompok etnis bersaudara saling berhadapan ke konflik antar kelompok individu berskala kecil. Transformasi konflik positif semacam ini sangat diperlukan dan hanya terjadi di kawasan pedalaman jauh dan transisi seperti di KK.

Konflik berskala kecil ini tidak akan meluas ke pertikaian antar kelompok komunal karena kemenangan salah satu pasangan KaDa bukan kemenangan satu kelompok sehingga penyusunan SOPD akan tetap berdasarkan profesionalisme bukan pada etnosentrisme. Banyak tokoh dari berbagai kelompok masyarakat di KK optimis bahwa pengurangan symbol-simbol kelompok yang sudah ada juga tidak akan terjadi, karena dalam kampanye PilBup Henrikus mewakili para simpatisannya berjanji tidak akan mengurangi apalagi menghapus symbol-simbol serta acara adat dan keagamaan yang pernah ada. Janji kampanye amat bijak ini perlu ditepati dalam implementasi kebijakan karena ia tidak saja untuk mempertahankan dan melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pendahulunya, serta perlunya menambah symbol-simbol dan kegiatan kelompok etnis lain, seperti rumah adat Dayak dan sebagainya, tetapi juga kewajiban untuk menegakkan ketertiban dan mempertahankan kedamaian dan kerukunan social di KK yang telah tercipta selama ini. Semoga!